



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberdayakan arsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai kode klasifikasi arsip yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
  - a. fungsi fasilitatif; dan
  - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah, desa, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 055 Tahun 2015 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 5 April 2023  
Pj. BUPATI BREBES,

TTD

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 5 april 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd  
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR                   TAHUN 2023  
TENTANG KODE KLASIFIKASI  
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

000 UMUM

KETATAUSAHAAN DAN  
KERUMAHTANGGAAN

Telekomunikasi

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan Dinas Kepala Daerah

Perjalanan Dinas DPRD

Perjalanan Dinas Pegawai

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Perjalanan Dinas Kepala Daerah

Perjalanan Dinas DPR

Perjalanan Dinas Pegawai

Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain:

Permintaan dan penggunaan ruang,  
gedung, kendaraan, wisma, rumah  
dinas dan fasilitas kantor lainnya)

Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah

Rapat

Penyediaan Konsumsi

Pengurusan Kendaraan Dinas

Pengurusan                   surat-surat  
kendaraan dinas

Pemeliharaan dan perbaikan

Pengurusan kehilangan dan  
masalah kendaraan

Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan  
Kantor

Pertamanan/ Landscape

Penghijauan  
Perbaikan Gedung  
Perbaikan Peralatan Kantor  
Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma  
Kebersihan Gedung dan Taman  
Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan  
Komputer  
Perbaikan / Pemeliharaan  
Pemasangan  
Ketertiban dan Keamanan  
Pengamanan, Penjagaan, dan  
Pengawasan terhadap Pejabat,  
Kantor dan Rumah Dinas  
Laporan Ketertiban dan Keamanan  
Administrasi Pengelolaan Parkir  
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,  
Petugas Kebersihan dan Pegawai  
lainnya

#### PERLENGKAPAN

Inventarisasi dan Penyimpanan  
Data hasil inventarisasi dan  
penyimpanan  
000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi  
dan penyimpanan  
Pemeliharaan peralatan kantor  
Data hasil pemeliharaan kantor  
Laporan dan evaluasi pemeliharaan  
kantor  
Distribusi  
Barang habis pakai  
Barang milik daerah  
Penghapusan Barang Milik Daerah antara  
lain: Keputusan Pembentukan  
Tim, Berita Acara Penghapusan  
Barang Milik Daerah, Daftar  
Barang yang dihapuskan, Laporan  
Hasil Pelaksanaan Penghapusan  
BMD termasuk didalamnya proses  
lelang penghapusan

## Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

### PENGADAAN

Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana

penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaankontrak)

Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

### PERPUSTAKAAN

Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Deposit Bahan Pustaka

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pangkalan Data Penerbit dan

## Pengusaha Rekaman



Terbitan Internasional dan Regional  
Pemantauan Wajib Serah Simpan  
Karya Cetak dan Karya Rekam  
Bibliografi dan Katalog

Koleksi Pustaka

Pembelian

Hibah

Hadiah

Tukar Menukar

Implementasi Undang-Undang

KCKR

Terbitan Internal

Pendistribusian bahan pustaka  
surplus

Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

Pengolahan Bahan Pustaka

Pangkalan Data Katalog Koleksi

Layanan Perpustakaan

Keanggotaan

Peminjaman

Pengembangan gemar baca

Kerjasama Perpustakaan

MoU

Perjanjian kerjasama

Partisipasi organisasi profesi dan  
kerjasama internasional

Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi

Perpustakaan

Pengembangan situs web

Pengembangan kemas ulang

informasi multimedia

Pengembangan program aplikasi  
perpustakaan

Pengembangan pangkalan data  
keperustakaan digital

Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

Konservasi

Perawatan Bahan Perpustakaan

Perbaikan Bahan Perpustakaan  
Penjilidan Bahan Perpustakaan  
Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)  
Transformasi Digital  
Kurasi Digital  
Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan Umum  
Perpustakaan Khusus  
Perpustakaan Sekolah  
Perpustakaan Perguruan Tinggi

#### KEARSIPAN

Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan Kearsipan

Pengembangan Profesi Arsiparis,  
antara lain Formasi Jabatan  
Arsiparis, Analisis Kebutuhan  
Arsiparis

Bimbingan Konsultasi Arsiparis

Penilaian Arsiparis

Pemilihan Arsiparis Teladan,  
antara lain Berkas

Penyelenggaraan Pemilihan  
Arsiparis Teladan, Berkas  
Penetapan Arsiparis Teladan

Data Base Arsiparis

Bimbingan Konsultasi Kearsipan

Supervisi dan Evaluasi, antara  
lain: Perencanaan Supervisi dan  
Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi  
dan Evaluasi, Laporan Hasil  
Supervisi dan Evaluasi

Data Base Bimbingan dan  
Konsultasi dan Supervisi

Fasilitasi Kearsipan, antara lain:

Fasilitasi SDM Kearsipan,  
Fasilitasi Prasarana dan Sarana

Kearsipan

Lembaga/Unit Kearsipan Teladan,  
antara lain: Berkas

Penyelenggaraan Pemilihan

Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas

Penetapan Lembaga/Unit

Kearsipan Teladan

Jadwal Retensi Arsip, antara

lain: Berkas Usulan Persetujuan

JRA, Surat Persetujuan JRA dari

Kepala ANRI

Pengelolaan Arsip Dinamis

Penciptaan (antara lain: Buku

Registrasi Naskah Masuk dan

Keluar, Buku Agenda, Kartu

Kendali, Lembar Pengantar/Buku

Ekspedisi)

Pemberkasan Arsip Aktif (antara

lain: daftar berkas dan daftar isi

berkas)

Penataan Arsip Inaktif (antara lain:

daftar arsip inaktif, daftar arsip

inaktif tematik)

Penggunaan (antara lain: daftar

arsip dinamis berdasarkan sistem

klasifikasi keamanan dan akses

arsip dinamis, bukti peminjaman

arsip)

Autentikasi Arsip Dinamis (antara

lain: pembuktian autentisitas,

pendapat tenaga ahli, pengujian,

penetapan autentisitas arsip

dinamis)

Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi

Arsip Vital, Perlindungan dan

Pengamanan Arsip Vital,

Penyelamatan Arsip Vital dan

Pemulihan Arsip Vital)

Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar

Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

Penyusutan Arsip

Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip

yang alih mediakan)

#### Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

#### Pengelolaan Arsip Statis

Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)

Penghargaan dan Imbalan

Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)

Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)

Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)

Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

Preservasi Kuratif

Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)

Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah

sumber)

Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

Pengelolaan SIKN dan JIKN

Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan

Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

Pengawasan Kearsipan

Pengawasan Kearsipan Internal

Pengawasan Kearsipan Eksternal

Sanksi

## PERSANDIAN

Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pengamanan persandian

Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi

Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi

Materiil sandi: sistem dan peralatan

Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan

Sandi, Komunikasi Sandi

Perencanaan Pengkajian

Administrasi Pengkajian

Pelaksanaan

Pelaporan

Pembinaan dan Pengendalian Persandian

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jaring Komunikasi

Layanan Sertifikasi Elektronik

Perencanaan dan Administrasi

Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama  
Penyesuaian Sistem dan Testing  
Pelaksanaan Bimbingan Teknis  
Pengguna  
Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat  
Elektronik  
Pelaporan

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Musyawahar Perencanaan Pembangunan  
/Musrenbang

Musrenbang Provinsi

000.7.1.2 Musrenbang Nasional

000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota

000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan

000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan

000.7.1.6 Musrenbang Desa

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang

Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah

Rencana Anggaran Daerah

Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Pembentukan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Program kerja tahunan

Penetapan / Kontrak Kinerja

Laporan Berkala

Laporan Insidental

Evaluasi Program

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan

Konsultasi Perencanaan Pembangunan

Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan  
Pelaporan Perencanaan

Pembangunan

Aksi Strategis Daerah

Rancangan awal perencanaan aksi

strategi daerah

Rapat pembahasan rancangan  
awaldengan Perangkat Daerah  
Sosisalisasi dengan Perangkat  
Daerah

Rancanganakhir perencanaan  
aksi strategi daerah

Penerapan perencana aksi strategi  
daerah

Perencanaan Pendanaan Pembangunan

Pendanaan Nasional dan Hibah

Pendanaan Daerah

Kerjasama Pembangunan Nasional

Surat Berharga Syariah Negara

Pendanaan On Top atau Inisiatif  
Baru

## ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Struktur Organisasidi lingkungan

Pemerintahan Kabupaten

Brebes Kab/Kota

Pembentukan

Pengubahan

Pembubaran

Uraian Jabatan

Analisa Jabatan

Analisa Beban Kerja

Ketatalaksanaan

Proses Bisnis

Standar Pelayanan

Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik

Standar Kompetensi jabatan struktural dan  
fungsional

Evaluasi Kelembagaan

Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

Budaya Kerja

Penilaian Mandiri Reformasi

Birokrasi



Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah

**PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN  
PENGEMBANGAN**

Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian,  
pengembangan yang  
dilakukan oleh  
pemerintah daerah

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan  
meliputi: rencana kerja,  
administrasi penelitian,  
pelaksanaan, hasil  
penelitian/pengkajian/rekomendas  
i

Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian,  
hasil pengkajian dan  
pengembangan

Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan  
pengembangan

Forum komunikasi penelitian, pengembangan  
dan penerapan ilmu pengetahuan  
dan teknologi

Data dan informasi hasil penelitian,  
pengembangan dan  
penerapan ilmu  
pengetahuan dan teknologi

Data

Statistik

Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian

Master proceeding/ jurnal penelitian,  
pengembangan dan  
penerapan ilmu  
pengetahuan dan  
teknologi

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

**OTONOMI DAERAH**

Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang  
dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi,

Bimbingan, Pengawasan,  
Monitoring dan Evaluasi)

Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

Assosiasi Daerah

Otonomi khusus dan daerah istimewa

Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Brebes

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pengembangan Kapasitas Daerah LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

PEMERINTAHAN UMUM

Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Dekonsentrasi dan Kerjasama

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

Fasilitasi Kecamatan

Fasilitasi Pelayanan Umum

Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Toponimi dan Data Wilayah

Pengembangan dan Penataan

Batas Antar Negara

Batas Antar Daerah Wilayah

Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar

Kelurahan Satu Kecamatan Dan

Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan

Pemeliharaan Batas Wilayah

## HUKUM

Program Legislasi

Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

Program Legislasi

Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan Rancangan

Peraturan Daerah, termasuk

naskah akademik, rancangan awal

sampai dengan rancangan

akhir dan telaah

hukum sampai diundangkan

Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah

Keputusan / Ketetapan Gubernur

Keputusan / Ketetapan Bupati

Keputusan / Ketetapan Walikota

Keputusan Sekretaris Daerah

Provinsi

Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten  
Keputusan Sekretaris daerah Kota  
Instruksi / Surat Edaran  
Instruksi / Surat Edaran Provinsi  
Instruksi / Surat Edaran  
Kabupaten  
Instruksi / Surat Edaran Kota  
Instruksi / Surat Edaran  
Setingkat Eselon II  
Surat Perintah  
Surat Perintah Gubernur  
Surat Perintah Bupati  
Surat Perintah Walikota  
Surat Perintah Setingkat Eselon II  
Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk  
Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis  
Nota Kesepakatan/ Memorandum of  
Understanding (MOU)/  
Kontrak/ Perjanjian kerja sama  
Dalam Negeri  
Luar Negeri  
Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-  
Undang, Peraturan Pemerintah,  
Keputusan Presiden dan Peraturan-  
Peraturan yang dijadikan referensi)  
Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum  
Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi  
Pemberian bantuan/ konsultasi  
hukum (Pidana, Perdata, Tata  
Usaha Negara dan Agama)  
Kasus/ Sengketa Hukum  
Pidana Kasus/ sengketa pidana,  
baik kejahatan maupun  
pelanggaran  
Perdata Kasus/sengketa perdata  
Tata Usaha Negara  
Perburuhan

Arbitrase  
Sengketa Adat  
Perijinan  
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  
Hak Cipta  
100.3.13.2 Hak Paten  
100.3.13.3 Hak Desain Industri  
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang  
100.3.13.5 Hak Merk  
Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan  
Politik yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah  
Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  
Ketahanan Ideologi Negara  
Wawasan Kebangsaan  
Bela Negara  
Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan  
Pembauran dan Kewarganegaraan  
Kewaspadaan Nasional  
Fasilitasi dan Evaluasi  
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama  
Intelijen Keamanan  
Fasilitasi Bina Masyarakat  
Perbatasan Antar Negara dan  
Kehidupan Masyarakat Perbatasan  
Fasilitasi dan Evaluasi  
Penanganan Konflik Pemerintahan  
Fasilitasi dan Laporan  
Penanganan Konflik Sosial  
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing  
dan Lembaga Asing  
Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan  
Kemasyarakatan  
Ketahanan Seni  
Ketahanan Budaya

Agama dan Kepercayaan  
Organisasi Kemasyarakatan  
Masalah Sosial Kemasyarakatan  
Fasilitasi  
Pelaksanaan Identifikasi dan  
Kompilasi Organisasi Masyarakat  
Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan  
Dengan Ormas/LNL  
Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi  
Administrasi  
Fasilitasi Sengketa Ormas  
Fasilitasi Ormas

#### Politik Dalam Negeri

Implementasi Kebijakan Politik  
Fasilitasi Kelembagaan Politik  
Pemerintahan  
Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik  
Verifikasi dan Evaluasi Partai  
Politik Yang Memperoleh Kursi  
Partai Politik Yang Tidak  
Memperoleh Kursi  
Pemerintah Daerah  
Database Parpol  
Pendidikan Budaya Politik  
Pemilihan Umum

#### Ketahanan Ekonomi

Ketahanan Sumberdaya Alam dan  
Kesenjangan Perekonomian  
Ketahanan Perdagangan Investasi,  
Fiskal dan Moneter  
Perilaku Perekonomian Masyarakat  
Ketahanan Lembaga Sosial  
Ekonomi

#### PEMILU

Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Daftar Penduduk Potensial Pemilih  
(DP4) Pemilu  
Daftar Pemilih Sementara (DPS)  
Daftar Pemilih Tambahan  
Keputusan KPU tentang Daftar  
Pemilih Tetap (DPT)  
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  
(DPT)

#### Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Dokumen pendaftaran peserta  
Pemilu dari partai politik  
Dokumen hasil verifikasi  
administrasi dan faktual partai  
politik  
Dokumen pendaftaran peserta  
Pemilu dari Calon Perseorangan  
Dokumen hasil verifikasi  
administrasi dan faktual

#### Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan Daerah Pemilihan dan  
Jumlah Kursi Anggota  
Keputusan KPU tentang  
penetapan daerah pemilihan dan  
jumlah kursi Anggota DPR  
Keputusan KPU tentang  
penetapan daerah pemilihan dan  
jumlah kursi Anggota DPR  
Keputusan KPU tentang  
penetapan daerah pemilihan dan  
jumlah kursi Anggota DPRD  
Kabupaten/Kota

#### 270.04.05 Peta Daerah Pemilihan

##### Pencalonan Pemilu

Petunjuk teknis pencalonan  
Surat pencalonan pendaftaran  
Daftar bakal calon  
Dokumen persyaratan masing-  
masing bakal calon



Dokumen verifikasi administrasi  
Daftar Calon Sementara dan  
Calon Tetap

Kampanye Pemilu

Keputusan KPU tentang penetapan  
jadwal kampanye

Nama juru

kampanye/pelaksana kampanye

Peringatan

tertulis/penghentian kegiatan  
kampanye

Dana Kampanye

Pedoman audit dana kampanye

Laporan dana kampanye peserta  
Pemilu

Laporan hasil audit dana kampanye

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Keputusan KPU tentang desain  
dan spesifikasi surat suara

Master surat suara

Surat suara yang terpakai

Surat Suara Tidak terpakai  
(rusak, salah, dan tidak  
digunakan)

Formulir pemilu di Pemerintah  
Daerah

Penetapan Hasil Pemilu

Perselisihan Hasil Pemilu

Surat-surat mengenai Perselisihan  
Hasil Pemilu

Jawaban dan kesimpulan termohon

Salinan Putusan lembaga peradilan

Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi  
Pamong Praja  
Tata Operasional Polisi Pamong  
Praja  
Sarana Prasarana Polisi Pamong  
Praja

Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja  
Perlindungan Masyarakat  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi  
Manusia

#### PENANGGULANGAN

BENCANA,

PENCARIAN, DAN

PERTOLONGAN

Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana  
yang dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

Perencanaan Penanggulangan Bencana,  
Pencarian, dan Pertolongan  
Rencana dan standardisasi dan  
pengawasan dan perbekalan  
Kurikulum dan silabus, evaluasi  
dan monitoring  
Tenaga pencarian pertolongan,  
penyiapan potensi pencarian dan  
pertolongan  
Permasyarakatan pencarian dan  
pertolongan, sertifikasi pencarian  
dan pertolongan  
Perencanaan dan standardisasi,  
penyelenggaraan operasi SAR,  
Siaga dan latihan, tempat latihan  
Registrasi BEACON

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Potensi Pencarian dan Pertolongan

Bina Ketenagaan dan Permasyarakatan

Rencana Pendidikan dan Pelatihan  
Penyiapan tenaga dan potensi  
Pencarian dan Pertolongan

Pemasyarakatan dan Sertifikasi  
Pencarian dan Pertolongan  
Pemasyarakatan Pencarian dan  
Pertolongan (Sosialisasi dan  
Penyuluhan)  
Sertifikasi Pencarian dan  
Pertolongan  
Operasi Pencarian dan Pertolongan  
Rencana Pengembangan dan Standardisasi  
Komunikasi  
Operasi Komunikasi  
Operasi Peralatan Komunikasi  
(Berita SAR)  
Operasi Peralatan Deteksi Dini  
(Berita SAR)  
Registrasi BEACON  
Inventarisasi dan Pemeliharaan  
Pengembangan Sistem Informasi  
Penyajian dan Layanan Informasi  
Pelaporan dan Evaluasi  
Laporan Harian  
Laporan Bulanan  
Laporan Tahunan  
Evaluasi

#### 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

##### PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah  
Tertinggal yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

##### Pembangunan Sumber Daya

Fasilitasi Pendidikan ketrampilan  
Pengembangan Sumber Daya  
Fasilitasi Kesehatan Pengembangan  
Sumber Daya  
Fasilitasi Sumber daya hayati dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Fasilitasi Mineral, energi dan

lingkungan hidup

Fasilitasi Teknologi dan inovasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya

Pemantauan dan evaluasi

#### Peningkatan Infrastruktur

Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur

Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur

Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur

Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur

Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur

Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur

Pemantauan dan evaluasi

#### Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha

Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha

Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah

Fasilitasi Kemitraan usaha

Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha

Pemantauan dan evaluasi

Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

Fasilitasi pengembangan usaha

ekonomi perdesaan tertinggal

Monitoring dan evaluasi Ekonomi  
desa tertinggal

Identifikasi dan inventarisasi  
pengembangan masyarakat dan  
desa tertinggal

Fasilitasi pengembangan  
masyarakat dan desa tertinggal

Monitoring dan evaluasi  
Masyarakat tertinggal

Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

#### Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya

Penguatan kapasitas lembaga lokal

Penguatan organisasi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat

Kerjasama antar lembaga sosial  
dan budaya

Ketenagakerjaan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan  
pembinaan lembaga sosial dan  
budaya

Pemantauan dan evaluasi

#### Pengembangan Daerah Khusus

Fasilitasi pengembangan Daerah  
perbatasan

Fasilitasi pengembangan Daerah  
rawan konflik dan bencana

Fasilitasi pengembangan Daerah  
Perdesaan

Fasilitasi pengembangan Daerah  
pulauterpencil dan terluar

Fasilitasi pengembangan Wilayah  
strategis

Koordinasi pelaksanaan kebijakan  
pengembangan daerah khusus

Pemantauan dan evaluasi

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK

Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak yang  
dilakukan oleh Pemerintah Daerah  
Pengarutamaan Gender Ekonomi, Politik  
Sosial dan Hukum

Data gender

Advokasi dan fasilitasi

Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah  
Sosial, Tenaga Kerja, Korban  
Perdagangan)

Pencegahan Kekerasan terhadap  
Perempuan

Data perlindungan perempuan

Advokasi dan fasilitasi

Monitoring, evaluasi dan analisa  
kebijakan perlindungan  
perempuan

Sistem aplikasi dan jaringan  
informasi gender

Analisis dan penyajian informasi  
gender

Partisipasi publik untuk  
kesejahteraan ibu

Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah  
Sosial, Kekerasan Terhadap Anak,  
Anak Berkebutuhan Khusus, Anak  
Berhadapan Dengan Hukum)

Pencegahan Kekerasan terhadap  
Anak

Data perlindungan anak

Advokasi dan fasilitasi

Monitoring, evaluasi dan analisa  
kebijakan perlindungan anak

Partisipasi publik untuk  
kesejahteraan anak

Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan,  
Kesehatan, Partisipasi,  
Lingkungan dan

Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

Pemenuhan Hak Anak

Data Klaster Hak Anak

Data tumbuh kembang anak

Advokasi dan fasilitasi

Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

Penghargaan Kabupaten Layak Anak

Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

## PENDIDIKAN

Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)

Pelatihan Sosial

Peringatan Hari anak

Block Grant

Pendidikan Masyarakat

Penyelenggaraan Program

Penilaian dan pemberian bantuan sosial

Pembinaan Program

Lomba/Pemberian Penghargaan

Pameran

Rakor

Sosialisasi

Sertifikasi dan Akreditasi

Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

Kurikulum, bahan ajar

Block Grant

Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,

Lomba, penghargaan,

penganugerahan

Bantuan operasional sekolah (BOS)

Bantuan Siswa Miskin

Pendidikan khusus/Layanan Khusus

Kurikulum, Bahan ajar, alat

bantu pembelajaran

Block Grant

Lomba, festival

Sosialisasi, bimtek

Pendataan

Kelembagaan

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pendataan dan Pemeetaan

Uji Kompetensi Guru

Sertifikasi Guru

Penghargaan guru dan tenaga  
kependidikan

Peningkatan kesejahteraan guru

Sosialisasi, bimtek

Block Grant

Sekolah Menengah Atas

Kurikulum

Bahan Ajar

Pelatihan

Block grant

Bimbingan teknis/sosialisasi

Lomba, Sayembara, festival

Bantuan operasional Sekolah (BOS)

Bantuan siswa miskin

Pendidikan Khusus-Layanan Khusus

Bahan ajar

Petunjuk Teknis

Block grant

Sosialisasi, bimtek



Lomba, sayembara, jambore,  
festival

Kurikulum/bahan pembelajaran

Alat bantu pembelajaran

Pendataan

Kelembagaan (Unit kesehatan  
sekolah, Pendidikan jasmani  
adaptif, pendidikan inklusi

Pendidik dan Tenaga Pendidik

Pendataan dan Pemetaan

Uji Kompetensi Guru

Setifikasi Guru

Penilaian prestasi kerja guru dan  
pengawas sekolah

Penghargaan guru dan tenaga  
kependidikan

Peningkatan kesejahteraan guru  
dan tenaga pendidik

Block grant

Bimbingan teknis/sosialisasi

Penilaian Pendidikan

Penilaian Akademik

Penilaian Non Akademik

Analisis dan Sistem Informasi

Penilaian

400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan

400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan  
tenaga kependidikan

400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan  
Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan

400.3.13.1 Prasarana Pendidikan

400.3.13.2 Sarana Pendidikan

400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

KEOLAHRAGAAN

Kebijakan di bidang Keolahragaan yang  
dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

Pengelolaan Olahraga Pendidikan

Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah

Olahraga Pendidikan Tinggi

Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

Pengelolaan Olahraga Rekreasi

Olahraga Massal

Olahraga Tradisional

Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata

Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah

Khusus Olahraga

Olahraga Pendidikan

Olahraga Rekreasi

Olahraga Prestasi

Sekolah Khusus Olahraga

Pengembangan Olahraga Tradisional dan

Layanan Khusus

Olahraga Tradisional

Layanan Khusus

Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Kemitraan Keolahragaan

Penghargaan Olahraga

Pembibitan dan IPTEK Olahraga

Pembibitan Olahraga

Kompetisi

IPTEK Olahraga

Peningkatan Tenaga dan Organisasi

Keolahragaan

Tenaga Keolahragaan

Organisasi Keolahragaan

Industri dan Promosi Olahraga

Industri Olahraga

Promosi Olahraga

Olahraga Prestasi

Daerah

Nasional

Internasional

Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga  
Standardisasi Keolahragaan  
Akreditasi dan Sertifikasi  
Keolahragaan  
Infrastruktur Olahraga

KEPEMUDAAN

- Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
  - Penelusuran (Duta Kepemudaan)
  - Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
  - Pengembangan
- Peningkatan Wawasan Pemuda
  - Wawasan Kebangsaan
  - Wawasan Lingkungan
  - Wawasan Sosial dan Hukum
- Peningkatan Kapasitas Pemuda
  - Kapasitas Iman dan Taqwa
  - Kapasitas IPTEK
  - Pemanfaatan IPTEK
- Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
  - Pengkajian
  - Pengembangan
  - Pendayagunaan (fasilitasi)
- Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
  - Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
  - Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
- Kewirausahaan
  - Kelembagaan
  - Pengaderan

Perintisan

Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan  
Kepramukaan

Pemberdayaan Organisasi  
Kepemudaan: Kelembagaan dan  
Sumberdaya

Pemberdayaan Organisasi  
Kemahasiswaan: Kelembagaan dan  
Sumberdaya

Pemberdayaan Organisasi  
Kepelajaran: Kelembagaan dan  
Sumberdaya

Pengawasan Kepramukaan:  
Kelembagaan, Program dan  
Sumberdaya

Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

Standardisasi  
Infrastruktur Pemuda

Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

Kemitraan  
Penghargaan Pemuda

## KEBUDAYAAN

Kebijakan di bidang Kebudayaan yang  
dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

400.6.2.1 Registrasi Nasional

400.6.2.2 Pelindungan

400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan

400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman

400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan

400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa

400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan  
apresiasi film

400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

Sejarah dan Nilai Budaya

Sejarah

Pemetaan nilai  
Verifikasi dan Perumusan Nilai  
Dokumentasi dan Publikasi  
Dokumentasi sejarah dan nilai  
sejarah  
Publikasi sejarah dan nilai sejarah  
Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya  
Internalisasi nilai budaya  
Kekayaan budaya  
Warisan budaya nasional dan  
dunia  
Diplomasi budaya

## KESEHATAN

Kebijakan di bidang Kesehatan yang  
dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Upaya Kesehatan Dasar

Pelayanan kedokteran keluarga  
Praktek klinis dokter di pelayanan  
kesehatan primer  
Pelaksanaan kesehatan primer  
Kesehatan gigi dan mulut di  
puskesmas  
Kesehatan gigi dan mulut di  
rumah sakit  
ICD 10, Destistry & Stomatology  
Infeksi menular lewat transfusi  
darah  
Penyakit mulut di tingkat primer  
Pembiayaan darah  
Penggunaan darah rasional  
Unit transfusi darah, bank darah  
rumah sakit dan jejaring  
pelayanan darah  
Pelayanan kesehatan di daerah  
terpencil, sangat terpencil dan  
kepulauan  
Akreditasi puskesmas

Puskesmas berprestasi

### Upaya Kesehatan Rujukan

Pelayanan kesehatan rujukan

Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)

Pelayanan rumah sakit privat

Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan

Pelayanan pasien jaminan kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa

Badan pengawas rumah sakit

Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan

Penanam Modal Asing (PMA)

Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya

### Keperawatan dan keteknisian medik

Pelayanan Keperawatan Dasar

Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit

Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum

Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus

Bina pelayanan kebidanan

### Penunjang medik dan sarana kesehatan

Mikrobiologi dan imunologi

Patologi dan toksilogi

Radiologi

Perizinan dan sertifikasi

Sarana dan prasarana kesehatan

Peralatan medis di fasilitas

pelayanan kesehatan

Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan

#### Kesehatan Jiwa

Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan

Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan

Etikolegal dan asesmen

Pencegahan dan

penanggulangan narkotika dan sejenisnya

Etikolegal dan asesmen

Kesehatan jiwa kelompok beresiko

#### Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan

Matra

Surveilans dan respon kejadian luar biasa

Imunisasi

Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan

Kesehatan matra

#### Pengendalian penyakit menular langsung

Pengendalian tuberkolosis

Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual

Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan

Pengendalian kusta dan frambusia

#### Pengendalian penyakit bersumber binatang

Pengendalian malaria

Pengendalian arbovirosis

Pengendalian zoonosis

Pengendalian filariasis dan kecacingan

#### Pengendalian penyakit tidak menular

400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah

400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik  
Penyakit kanker  
Penyakit kronis dan generatif  
Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan

Penyehatan lingkungan

Penyehatan air dan sanitasi dasar

Pemukiman dan tempat umum

Kawasan dan sanitasi darurat

Higien sanitasi pangan

Pengamanan limbah, udara, radiasi

Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan

Gizi

Gizi makro

Gizi mikro

Gizi klinik dan diatetik

Konsumsi makanan dan jasa makanan

Kewaspadaan gizi

Kesehatan ibu

400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil

400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas

400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi

Keluarga berencana

Perlindungan kesehatan reproduksi

Kesehatan anak

Kelangsungan hidup bayi

Kelangsungan anak balita dan prasekolah

Kewaspadaan penanganan balita beresiko

Kualitas hidup anak usia sekolah



- dan remaja
- Perlindungan kesehatan anak
- Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
  - Kesehatan tradisional keterampilan
  - Kesehatan tradisional ramuan
  - Kesehatan alternatif dan komplementer
  - Penapisan dan kemitraan
- Kesehatan kerja dan Olah raga
  - Pelayanan kesehatan kerja
  - Kapasitas kerja
  - Lingkungan kerja
  - Kemitraan kesehatan kerja
  - Kesehatan perkotaan
  - Kesehatan olahraga
- Obat Publik dan perbekalan kesehatan
  - Harga obat publik
  - Pengadaan obat
  - Perbekalan kesehatan
- Produksi dan distribusi alat kesehatan
  - Alat kesehatan
  - Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
  - Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- Kefarmasian
  - Pelayanan kefarmasian
  - Farmasi klinis
  - Farmasi Komunitas
  - Penggunaan obat rasional
- Produksi dan distribusi kefarmasian
  - Obat tradisional
  - Kosmetik dan makanan
  - Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus

Kemandirian obat dan bahan baku  
obat

Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan

Surat keterangan

Sertifikasi dan perijinan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pencegahan, mitigasi dan  
kesiapsiagaan

Tanggap darurat dan pemulihan

Pemantauan dan informasi

Penanggulangan krisis kesehatan  
dalam bidang pengendalian  
penyakit dan penyehatan

Pelayanan kesehatan reproduksi  
situasi bencana

Pengembangan dan Jaminan Kesehatan

Tersedianya data NHA setiap tahun

Tersedianya dokumen teknis  
penguatan pelaksanaan JKN

Intelegensia Kesehatan

Pemeliharaan dan peningkatan  
kemampuan inteligensia  
kesehatan

Penanggulangan masalah  
inteligensia kesehatan

Kesehatan Haji

Pelayanan dan pendayagunaan  
sumber daya kesehatan haji

Peningkatan kesehatan dan  
pengendalian faktor risiko  
kesehatan haji

Promosi Kesehatan

Sarana Promosi Kesehatan

Pembinaan advokasi dan  
kemitraan serta pemberdayaan  
peran

Pengembangan pesan promosi  
kesehatan

## Hari Kesehatan

### Data dan Informasi

Statistik kesehatan

Analisis dan diseminasi informasi

Pengembangan sistem informasi  
dan bank data kesehatan

### Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

Penilaian obat tradisional,  
suplemen makanan dan kosmetik

Standardisasi obat tradisional,  
kosmetik dan produk komplimen

Inspeksi dan sertifikasi obat  
tradisional, kosmetik dan produk  
komplimen

Obat Asli Indonesia

### Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Penilaian keamanan pangan

Standardisasi produk pangan

Inspeksi dan sertifikasi produk  
pangan

Surveilans dan penyuluhan  
keamanan pangan

Pengawasan produk dan bahan  
berbahaya

### Rekam Medis

## AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan  
yang dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

### Fasilitasi

Data Forum Komunikasi Umat  
Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota  
Pelaksanaan Kerukunan Umat  
Beragama dan Kepercayaan  
Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan  
dan Kepercayaan

Kasus Keagamaan  
Kasus Aliran Keagamaan  
Pembinaan Kepercayaan  
Kepada Tuhan YME  
Kelembagaan dan kepercayaan  
Pembinaan Kerukunan Hidup  
Beragama  
Komunitas Kepercayaan  
Pengetahuan dan ekspresi budaya  
tradisional  
Lingkungan Budaya dan Pranata  
Sosial

## SOSIAL

Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial anak balita  
Kesejahteraan sosial anak terlantar  
Kesejahteraan sosial anak  
berhadapan dengan hukum  
Kesejahteraan sosial anak dengan  
kecatatan  
Kesejahteraan sosial anak yang  
membutuhkan perlindungan  
khusus

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial orang dengan  
kecacatan tubuh dan bekas  
penderita penyakit kronis, netra  
dan runtu wicara, mental  
Kelembagaan dan advokasi sosial  
Asistensi dan pemeliharaan  
kesejahteraan sosial  
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial  
Gelandangan, pengemis dan  
pemulung  
Tuna susila dan korban trafficking

perempuan

Warga binaan lembaga  
pemasyarakatan meliputi  
penyiapan, reintegrasi

Pelayanan sosial orang dengan HIV  
/ AIDS dan kelompok minoritas

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan  
NAPZA

Pelayanan sosial lanjut usia

Pelayanan sosial dalam dan luar  
panti

Pengembangan kelembagaan  
meliputi pembinaan lembaga,  
kerjasama lembaga

Advokasi dan pelayanan sosial  
kedaruratan

Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana  
bantuan sosial

Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan  
dan Pekerja Migran

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Ketahanan sosial masyarakat  
meliputi keserasian sosial,  
penguatan Sumber Daya

Tanggap darurat meliputi  
bantuan darurat, advokasi sosial

Pemulihan sosial meliputi  
penguatan sosial, reintegrasi sosial

Kerjasama meliputi kerjasama  
pemerintah, kerjasama non  
pemerintah

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Kesiapsiagaan dan mitigasi

Tanggap darurat meliputi bantuan  
darurat, advokasi sosial

Pemulihan sosial dan penguatan  
sosial

Kerjasama

## Jaminan Sosial

Seleksi dan verifikasi

Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi

Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran

Kerjasama

## Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial

Ketahanan keluarga

Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan

Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial

Kemitraan dunia usaha

Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas

## Pemberdayaan komunitas adat terpencil

Persiapan pemberdayaan

Pemberdayaan sumber daya manusia

Penggalian dan pengembangan potensi

Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil

Kerjasama kelembagaan

## Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Identifikasi dan analisis

Pengembangan kapasitas

Penataan sosial lingkungan kumuh

Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

Bantuan Langsung

Kerjasama Kelembagaan

Kepahlawanan, Keperintisan dan

## Kesetiakawanan Sosial

Penghargaan dan  
kesejahteraan keluarga pahlawan  
Pelestarian nilai-nilai  
kepahlawanan dan keperintisan  
Pengembangan kesetiakawanan  
sosial  
Pengelolaan taman makam  
pahlawan

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Desa yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Pengembangan  
Desa dan Kelurahan

Administrasi Pemerintahan Desa  
dan Kelurahan

Fasilitasi Permusyawaratan Desa  
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Desa

Pengembangan Kapasitas Desa

Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Lembaga Masyarakat

Pembangunan Partisipatif

Pendataan Potensi Masyarakat

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pelatihan Masyarakat

Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya

Masyarakat

Budaya Nusantara

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan  
Keluarga

Kesejahteraan Sosial

Tenaga Kerja Perdesaan

Usaha Ekonomi Masyarakat

Usaha Pertanian dan Pangan  
Usaha Perkreditan dan Simpan  
Pinjam  
Produksi dan Pemasaran  
Usaha Ekonomi dan Keluarga  
Ekonomi Perdesaan dan  
Masyarakat Tertinggal  
Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna  
Perdesaan  
Fasilitasi Konservasi dan  
Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan  
Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan  
Pesisir Perdesaan  
Fasilitasi Prasarana dan Sarana  
Perdesaan  
Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan  
Pengkajian Teknologi Perdesaan  
Pemasyarakatan dan Kerjasama  
Teknologi Perdesaan  
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

#### PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Kebijakan di bidang Pertamanan dan  
Pemakaman yang dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah

Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

400.11.2.2 Taman Kota

400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan  
Tepian Air



Peran Serta Masyarakat  
Pengawasan dan Penindakan  
Pengelolaan Data  
Evaluasi dan Pelaporan

## KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kebijakan di bidang Kependudukan dan  
Catatan Sipil yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah.

Pendaftaran Penduduk

Identitas Penduduk

Pindah Datang Penduduk Dalam  
Wilayah NKRI

Pindah Datang Penduduk Antar  
Negara

Pendataan Penduduk Rentan  
Monitoring Evaluasi dan  
Dokumentasi

Pencatatan Sipil

Kelahiran dan Kematian

Perkawinan dan Perceraian

Pengangkatan Pengakuan dan  
Pengesahan Anak serta Perubahan

Pencatatan Kewarganegaraan

Monitoring Evaluasi dan  
Dokumentasi

Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan

Kelembagaan Informasi

Administrasi Kependudukan

Pengelolaan data Administrasi  
Kependudukan

Penyajian dan Layanan Informasi

Administrasi Kependudukan

Monitoring Evaluasi dan  
Dokumentasi

## Pengembangan Kebijakan Kependudukan

Kuantitas Penduduk

Kualitas Penduduk

Mobilitas Penduduk

Perlindungan dan Pemberdayaan  
Penduduk

Pengembangan Wawasan  
Kependudukan, Monitoring dan  
Evaluasi

## Penyerasian Kependudukan

Indikator Kependudukan

Proyeksi Penduduk

Perencanaan Kependudukan

Penyerasian Kebijakan  
Kependudukan dengan Lembaga  
Non Pemerintah

Pelaksanaan Penyerasian  
Kebijakan Kependudukan dengan  
Lembaga Pemerintah

## KELUARGA BERENCANA

Kebijakan di bidang Keluarga  
Berencana yang dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah

Analisis pengaduan kebijakan pengendalian  
penduduk  
Pengumpulan dan pengolahan data  
Evaluasi dan pelaporan

Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian  
penduduk  
Penyiapan fasilitas  
Evaluasi dan pelaporan

Profil dan proyeksi penduduk  
Data profil dan proyeksi penduduk  
Evaluasi data profil dan proyeksi  
penduduk

Penetapan parameter pengendalian penduduk  
Penetapan sasaran parameter

Evaluasi sasaran parameter  
Pemanfaatan perencanaan pengendalian  
penduduk  
Pemanfaatan profil dan proyeksi  
Pemanfaatan parameter

Pengembangan Sistem

Pengembangan Sistem Jalur  
Pendidikan Formal

Pengembangan Sistem Jalur  
Pendidikan Nonformal dan  
Informal

Pengembangan Materi

Pengembangan Materi Jalur  
Pendidikan Formal

Pengembangan Materi Jalur  
Pendidikan Nonformal dan Informal

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Jalur  
Pendidikan Formal

Monitoring dan Evaluasi Jalur  
Pendidikan Nonformal dan  
Informal

Analisis Sosial

Analisis Ekonomi

Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan  
Keamanan

Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung  
Lingkungan

Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan  
Klinik Pemerintah

Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana  
keluarga berencana

Kualitas pelayanan keluarga berencana  
pemerintah

Standarisasi pelayanan keluarga berencana  
pemerintah

Monitoring dan evaluasi pelayanan  
keluarga berencana pemerintah

Bina keluarga berencana rumah sakit dan  
klinik swasta

Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga  
berencana swasta

Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta  
400.13.19.1 Standarisasi pelayanan  
keluarga berencana swasta

400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan  
keluarga berencana swasta

Akses dan kualitas pelayanan keluarga  
berencana jalur wilayah  
tertinggal, terpinggirkan dan  
perbatasan

Peningkatan akses pelayanan  
keluarga berencana wilayah  
tertinggal, terpinggirkan, dan  
perbatasan

Peningkatan kualitas pelayanan  
keluarga berencana wilayah  
tertinggal, terpinggirkan, dan  
perbatasan

Akses dan kualitas pelayanan keluarga  
berencana wilayah miskin  
perkotaan 400.13.21.1

Peningkatan akses  
pelayanan

keluarga berencana wilayah miskin  
perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan  
keluarga berencana wilayah  
miskin perkotaan

Kesertaan keluarga berencana pria

Peningkatan akses keluarga  
berencana pria

Peningkatan partisipasi keluarga  
berencana pria

Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

Pencegahan kanker alat reproduksi dan  
penanggulangan infertilitas

Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak

Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak

Monitoring bina keluarga Balita dan anak

Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

Pelebagaan bina ketahanan remaja

Pelebagaan bina ketahanan remajajalur pendidikan

Pelebagaan bina ketahanan remajajalur masyarakat

Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

Monitoring bina ketahanan remaja 400.13.29.2

Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

Pengembangan Program Bina Ketahanan

Keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia

Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga

Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomikeluarga

Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

Advokasi dan pencitraan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

400.13.42.1 Promosi

Sarana produksi media komunikasi

Produk media komunikasi

Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

Hubungan dengan lembaga non pemerintah

400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan

lembaga non pemerintah

400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan

lembaga nonpemerintah

Tenaga Lini Lapangan

Pengembangan tenaga lini lapangan

Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

Institusi Masyarakat Pedesaan

Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

Mekanisme Operasional lini lapangan

Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan

Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

Pengembangan sistem pencatatan dan

pelaporan

Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

Pengumpulan dan pengolahan data

Analisis dan evaluasi

Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Sistem aplikasi dan bank data

Pengembangan sistem aplikasi

Pengelolaan bank data

Infrastruktur teknologi informasi

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

Dokumentasi dan penyebaran informasi

400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan

400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

## HUBUNGAN MASYARAKAT

Keprotokolan

Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

Buku tamu Keprotokolan

Agenda kegiatan pimpinan daerah

Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

Daftar nama/alamat kantor /pejabat

Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman



suara/ multi media

Pengumpulan, pengolahan dan penyajian  
informasi kelembagaan

Kliping koran

Brosur /Leaflet/poster /plakat

Pengumuman /pemberitaan

Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan  
Kabupaten Brebes

Hubungan antar lembaga  
pemerintah

Hubungan dengan organisasi  
sosial / LSM

Hubungan dengan perusahaan

Hubungan dengan Perguruan

Tinggi/ sekolah, termasuk magang,

Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/

Praktek Kerja Lapang (PKL)

Forum Kehumasan

Hubungan dengan Media Massa

Dengar pendapat/hearing DPRD

Bahan/materi pidato/siding Muspida  
Provinsi/Kota/Kabupaten

Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal

Publikasi melalui media cetak maupun  
elektronik

Pameran /sayemara/lomba/festival,  
pembuatan spanduk dan  
iklan

Penghargaan/tanda kenang-kenangan

Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela  
Sungkawa, Permohonan Maaf

## 500 PEREKONOMIAN

### KETAHANAN PANGAN

Kebijakan dibidang Ketahanan Pangan yang  
dilakukan Pemerintah Daerah

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketersediaan Pangan

Akses Pangan

Kerawanan Pangan  
Distribusi dan Cadangan Pangan  
Distribusi Pangan  
Harga Pangan  
Cadangan Pangan  
Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan  
Konsumsi Pangan  
Penganekaragaman Pangan  
Keamanan Pangan Segar  
Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan  
Dewan Ketahanan Pangan  
Penghargaan Ketahanan Pangan  
Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)  
Bimbingan Teknis  
Evaluasi

## PERDAGANGAN

Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  
Perdagangan Dalam Negeri  
Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha  
Bina Usaha Jasa Perdagangan  
Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan  
Informasi Perusahaan  
Pelaku Pasar  
Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah  
Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah  
Pengembangan Produk Lokal  
Pencitraan Produk Dalam Negeri  
Pengembangan Sarana Distribusi  
Pengelolaan Sarana Distribusi  
Kerjasama Pengembangan Sistem

Logistik

Informasi dan Bimbingan Teknis

Penyedia Jasa Logistik

Informasi Pasar

Informasi Hasil Industri

Barang Strategis

Bahan Pokok Agro

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kelembagaan dan informasi standar

Kerjasama Standarisasi

Perumusan dan penerapan standar

Tata usaha

Kerjasama, informasi, dan  
publikasi

Analisa penyelenggaraan

perlindungan konsumen

Bimbingan konsumen dan pelaku  
usaha

Fasilitas kelembagaan

Produk pertambangan dan aneka  
industri

Produk pertanian, kimia dan  
kehutanan

**Jasa**

Kerjasama

Sarana dan Kerjasama

Kelembagaan dan dan penilaian

UTTP dan Standar Ukuran

Pengawasan

Balai pengelolaan Standar Nasional

Satuan Ukuran

Balai Pengujian UTTP

Perdagangan Berjangka Komoditi

Pengkajian pasar

Pengawasan Transaksi

Pengawasan Keuangan dan Audit

Pengkajian pasar

Pengembangan Pasar

Sistem informasi

Pembinaan pasar lelang dan  
sistemresi gudang

Pengawasan pasar lelang

Pengawasan sistem gudang

Bimbingan Teknis

Evaluasi

## KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Kelembagaan Koperasi dan UKM

Organisasi dan Badan Hukum  
Koperasi

500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM

500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi

500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas  
Produksi

500.3.3 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan  
Hortikultura

500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan

500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan

500.3.3.4 Industri Kerajinan dan  
Pertambangan

500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka  
Usaha Pembiayaan

500.3.4.1 Program Pendanaan

500.3.4 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian  
Simpan Pinjam

500.3.4.3 Urusan Permodalan

500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan

500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan  
Kredit

500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir  
KUKM (LPDB)

## Pemasaran dan Jaringan Usaha

Perdagangan Dalam Negeri

Ekspor dan Impor

Sarana dan Prasarana Pemasaran

Kemitraan dan Jaringan Usaha

Informasi dan Publikasi Bisnis

Lembaga Layanan Pemasaran LLP

Koperasi dan UKM

## Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Kewirausahaan

Kebijakan Pendidikan Koperasi dan

UKM

Peran Serta Masyarakat

Monitoring dan Evaluasi Diklat

Koperasi dan UKM

Advokasi

## Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu

500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha

500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga

Pengembangan Bisnis (LPB)

500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK

500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK

500.3.8.1 Penelitian Koperasi

500.3.8.2 Penelitian UKM

500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya

500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Peraturan Perundang-Undangan

Sarana dan Prasarana

Monitoring dan Evaluasi

## KEHUTANAN

Kebijakan di bidang Kehutanan yang

dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Penyuluhan

Program Kerja Penyuluhan  
Materi Penyuluhan  
Program Penyuluhan  
Sarana Penyuluhan  
Pengembangan Tenaga Penyuluhan  
Pelaksanaan Penyuluhan  
Pemberdayaan Masyarakat  
Deseminasi  
Evaluasi, dan Laporan

#### Planologi Kehutanan

Perencanaan Makro Kawasan  
Hutan  
Penataan Ruang Kawasan Hutan  
Statistik dan Jaringan Komunikasi  
Data Kehutanan  
Pengukuhan dan Penataaan  
Kawasan Hutan  
Perubahan Fungsi dan Peruntukan  
Kawasan Hutan  
Informasi dan Dokumentasi  
Kawasan Hutan  
Inventarisasi Sumber Daya Hutan  
Pemantauan Sumber Daya Hutan  
Pemetaan Sumber Daya Hutan  
Jaringan Data Spasial  
Penggunaan Kawasan Hutan  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
(PNBP) Penggunaan Kawasan  
Hutan  
Informasi Penggunaan Kawasan  
Hutan  
Pembentukan Wilayah Pengelolaan  
Hutan  
Penyiapan Areal Pemanfaatan  
Hutan  
Informasi Wilayah Pengolaandan  
Pemanfaatan Kawasan Hutan

#### Bina Usaha Kehutanan

Data areal HPH /HTI/IUPHHK  
SK HPH/HTI/IUPHHK  
Kerjasama  
Pembatalan/Penolakan  
Perpanjangan  
Modal dan Peralatan  
Investasi Industri  
Peralatan  
Tenaga Kerja  
Pemegang Saham  
Neraca Perusahaan  
Rencana Karya Kesatuan  
Pengelolaan Hutan Produksi  
(KPHP)  
Rencana Karya Pengusahaan  
Hutan (RKPH)  
Rencana Karya Tahunan  
Pengusahaan Hutan (RKT)  
Rencana Karya Lima Tahun  
Pengusahaan Hutan (RKL)  
Target Produksi RKT dan Beban  
Kerja  
Produksi Kayu  
Produksi non kayu  
Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK  
Industri Kayu Non  
HPH/HTI/IUPHHK  
Industri Non Kayu  
Hutan Tanaman Industri Pulp  
Hutan Tanaman Industri  
Pertukangan  
Pelanggaran dan Sanksi  
Pemblokiran  
Denda  
Pencabutan Areal  
HPH/HTI/IUPHHK  
Pola Pemanfaatan Hutan Produksi  
Penataan Pemanfaatan Hutan

Produksi  
Informasi Sumber Daya Hutan  
Produksi  
Pengembangan Investasi Usaha  
Penyiapan Pemanfaatan Hutan  
Alam  
Rencana Kerja Pemanfaatan  
Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha  
Produksi Hasil  
Produksi Hutan Alam  
Penilaian Kinerja Usaha  
Pemanfaatan Hutan Alam  
Pengembangan Hutan Tanaman  
Industri  
Pengembangan Hutan Tanaman  
Rakyat  
Pengembangan Rencana Kerja  
dan Produksi Hutan  
Tanaman/Rencana Kerja Usaha  
Produksi  
Penilaian Kinerja Pengembangan  
Usaha Pemanfaatan Hutan  
Tanaman  
Pembiayaan Hutan Tanaman  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
Hasil Hutan  
Peredaran Hasil Hutan  
Pengukuran dan Pengujian Hasil  
Hutan  
Penertiban Peredaran Hasil Hutan  
Pengolahan dan Pemasaran Hasil  
Hutan  
Pengendalian Bahan Baku dan  
Industri Primer Hasil Hutan  
Penilaian Kinerja Industri dan  
Pemasaran Hasil Hutan  
Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK  
Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur



## Standardisasi dan Lingkungan

Standardisasi

Sarana Pengujian Hasil Hutan

Pengembangan

Pemasaran Hasil Hutan

Pengendalian Lingkungan

Angkutan Hasil Hutan

Tanda Pengenal Perusahaan Tata

Usaha Hasil Hutan

Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan

Palu Tok Kualitas Tata Usaha

Hasil Hutan

Pass Angkutan Hasil Hutan

Sertifikat Ekspor Hasil Hutan

## Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Flora dan Fauna yang Dilindungi

Flora dan Fauna yang Tidak

Dilindungi

Lembaga Konservasi/Kebun

Binatang

Konvensi Keanekaragaman Hayati

Kawasan Konservasi

Pengamanan Hutan

Program dan Evaluasi Penyidikan  
dan Perlindungan

Penyidikan dan Perlindungan

Wilayah Hutan

Polisi Kehutanan dan Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pemanfaatan Jasa

Lingkungan dan Wisata Alam

Bina Cinta Alam

Kader Konservasi Sumber Daya  
Alam

Data organisasi pencinta alam dan  
kader konservasi SDA

## Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial

Pengelolaan Benih

Kebun Benih

Tegakan Benih

Pengadaan Benih

Pengujian dan Penyimpanan Benih

Lalu Lintas Angkutan Benih

Pembibitan

Lalu Lintas Angkutan Benih

Pengembangan Usaha Perbenihan

Pengendalian Peredaran Benih

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tanaman Reboisasi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  
(DAS)

Perhutanan Sosial

Pengendalian Perladangan

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Penelitian, Pengkajian dan  
Pengembangan Kehutanan

Monitoring dan Evaluasi Penelitian  
Diseminasi

Gelar Teknologi

Forum Komunikasi Penelitian dan  
Pengembangan

## KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan  
yang dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

Perikanan Tangkap

Data dan Statistik Perikanan  
Tangkap

Rancang Bangun dan Kelaikan  
Kapal Perikanan

Rancang Bangun dan Kelaikan  
Alat Tangkap Ikan

Pendaftaran Kapal Perikanan

Pengawakan Kapal dan  
Ketenagakerjaan Perikanan

Perbantuan dan Evaluasi Kapal  
Perikanan dan Alat Penangkapan  
Ikan

Alokasi Usaha Penangkapan Ikan  
Tata Pengusahaan Penangkapan  
Ikan

Verifikasi Dokumen Penangkapan  
Ikan

Pelayanan Dokumen

Penangkapan Ikan

Pemantauan dan Evaluasi

Pelayanan Usaha Penangkapan  
Ikan

Kelembgaan Usaha Penangkapan

Investasi dan Permodalan Usaha

Kenelayanan

Pembinaan Pengelolaan Usaha

Pemantauan dan Evaluasi Usaha

Penangkapan Ikan

Perikanan Budidaya

Potensi Lahan dan Air

Prasarana dan Sarana Budidaya

Air Tawar

Pengelolaan Induk Perbenihan

ikan airtawar

Perbenihan Skala Kecil

Informasi dan Distribusi

Pembenihan

Budidaya Air Tawar

Budidaya Ikan Hias

Sertifikasi Budidaya Perikanan

Data dan Statistik Perikanan

Budidaya

Hama dan Penyakit Ikan

Perlindungan Lingkungan Budidaya

Investasi dan Permodalan Usaha

Budidaya

Kewirausahaan Budidaya

Pelayanan Usaha Budidaya  
Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan  
Promosi Usaha dan Budaya  
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  
Standarisasi Pengolahan Hasil  
Pengembangan Produk  
Pengembangan Usaha  
Mikro, Kecil, dan Menengah  
Industri Pengolahan  
Sarana dan Prasarana Pengolahan  
Hasil  
Standarisasi Pengembangan  
Produk Non Konsumsi  
Promosi dan Jaringan Ikan Hias  
Pengembangan Industri  
Sarana dan Prasarana  
Pengembangan Produk Non  
Konsumsi  
Kelembagaan Pemasaran Dalam  
Negeri  
Analisis dan Informasi Pasar  
Dalam Negeri  
Jaringan Distribusi dan Kemitraan  
Pemasaran Dalam Negeri  
Promosi dan Kerja Sama  
Pemasaran Dalam Negeri  
Sarana dan Prasarana Pemasaran  
Dalam Negeri  
Kelembagaan Pemasaran Luar  
Negeri  
Analisis dan Informasi Pemasaran  
Luar Negeri  
Pengembangan Ekspor  
Pengembangan Impor  
Promosi dan Kerja Sama  
Pemasaran Luar Negeri  
Pelayanan Usaha  
Kemitraan Usaha

Ketenagakerjaan Pengolahan dan  
Pemasaran  
Investasi dan Permodalan  
Informasi dan Promosi  
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil  
Rencana Tata Ruang Laut  
Nasional dan Perairan Yurisdiksi  
Rencana Tata Ruang dan Zona  
Wilayah I  
Rencana Tata Ruang dan Zona  
Wilayah II  
Informasi dan Evaluasi Spasial  
Jejaring, Data, dan Informasi  
Konservasi  
Konservasi Wawasan  
Konservasi Jenis Ikan  
Pemanfaatan Kawasan dan Jenis  
Ikan  
Mitigasi Bencana Lingkungan  
Pendayagunaan Sumber Daya  
Kelautan  
Penanggulangan Pencemaran  
Sumber Daya Pesisir dan Laut  
Rehabilitasi dan Reklamasi  
Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil  
Pengelolaan Ekosistem Pulau-  
Pulau Terkecil  
Investasi dan Promosi Pulau-Pulau  
Terkecil  
Sarana dan Prasarana Pulau-  
Pulau Terkecil  
Akses Permodalan  
Akses Ilmu Pengetahuan dan  
Teknologi  
Sosial Budaya Masyarakat  
Pengembangan Usaha  
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan  
Perikanan

Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat

Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur

Pengawasan

Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran

Pengawasan Usaha Budidaya

Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi

Pengawasan Pencemaran Perairan

Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil

Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati

Logistik dan Operasional Wilayah Barat

Logistik dan Operasional Wilayah Timur

Perawatan Kapal Pengawas

Pengawasan Kapal Pengawas Sistem Pemantauan

Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Pemantauan Sumber Daya

Perikanan

Pengembangan

Infrastruktur Pengawasan

Penyidikan

Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan

Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Pelanggaran

Karantina Ikan

Pemeriksaan Ikan

Penahanan

Pengasingan  
Pengamatan  
Pengakuan  
Penolakan  
Pemusnahan  
Persyaratan lalu Lintas Pemasukan  
Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran  
Permohonan Sertifikat  
Pemasukan Formulir  
Pemasukan Sertifikat  
Evaluasi dan Monitoring Sertifikat  
Surat Perintah  
Rekomendasi  
Penutupan Suatu Area  
Pelanggaran Lalu Lintas Ikan  
Pengawasan Peraturan  
Perkarantinaan  
Pengawasan Pelaksanaan  
Operasional  
Instalasi Karantina Sementara  
Lokasi Karantina

#### PERTANIAN

Kebijakan di bidang Pertanian yang  
dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Perlindungan hortikultura

Perlindungan Tanaman Buah

Perlindungan Tanaman Sayuran  
dan Tanaman Obat

Perlindungan Tanaman Florikultura

Dampak iklim dan Persyaratan  
Teknis

Perbenihan Hortikultura

Penilaian Varietas

Pengawasan Mutu Benih

Budidaya dan Pascapanen

Florikultura

Perluasan dan Pengelolaan Lahan

- Basis Data Lahan
- Pengendalian Lahan
- Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
- Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
- Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
- Pengelolaan Air Irigasi
  - Pengembangan Sumber Air
  - Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
  - Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
  - Kelembagaan
- Pembiayaan Pertanian
  - Pembiayaan Program
  - Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
  - Pembiayaan agribisnis
  - Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
- Pupuk Pestisida
  - Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
  - Pupuk Anorganik
  - Pestisida
  - Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- Alat dan Mesin Pertanian
  - Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
  - Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
  - Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- Perbenihan Tanaman Pangan
  - Penilaian Varietas dan Pengawasan



Mutu Benih

Produksi Benih Serealia

Produksi Benih Aneka Kacang dan  
Umbi

Kelembagaan Benih

Budidaya Serealia

Padi Irigasi dan Rawa

Padi Tadah Hujan dan Lahan

Kering

Jagung

Serealia Lain

Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

Kedelai

Ubi Kayu

Aneka Kacang

Aneka Umbi

Tanaman Pangan

Pengelolaan Data Organisasi

Pengganggu Tumbuhan

Dampak Perubahan Iklim

Teknologi Pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan

Pengelolaan Pengendalian Hama

Tepadu

Pascapanen Tanaman Pangan

Padi

Jagung dan Serealia lain

Kedelai dan Aneka Kacang Aneka

Umbi

Pengolahan Hasil Pertanian

Tanaman Pangan

Hortikultura

Perkebunan

Peternakan

Mutu dan Standarisasi

Standardisasi

Penerapan dan Pengawasan

Jaminan Mutu

Akreditasi dan Kelembagaan  
Kerjasama dan Harmonisasi  
Pengembangan Usaha dan Investasi  
Kemitraan dan Kewirausahaan  
Investasi  
Promosi Dalam Negeri  
Promosi Luar Negeri  
Pemasaran Domestik  
Informasi Pasar  
Pemantauan Pasar dan Stabilisasi  
Harga  
Sarana dan Kelembagaan Pasar  
Jaringan Pemasaran  
Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan  
Pengembangan, antara lain:  
Rencana Kerja, TOR/ Proposal,  
Pembentukan Tim Kerja dan  
Surat menyurat  
Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan  
Hasil Penelitian dan Pengembangan  
Hasil Pengkajian dan Kebijakan  
dan Strategi  
Diseminasi  
Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian  
Pameran, Temu Lapang, Temu  
Bisnis, Demlot, Seminar  
Lokakarya, Temu Karya,  
Workshop  
Jurnal, Buletin, Monograf,  
Prosiding, dan Publikasi lainnya  
Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan  
Pengembangan  
Forum Komunikasi Penelitian dan  
Pengembangan  
Data Penelitian dan Pengembangan  
Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan  
Pengembangan  
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  
Hak Cipta

- 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
- 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
- 500.6.26.4 Hak Merek
- 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
- 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
- 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
  - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
  - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
  - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
  - 500.6.28.1 Sertifikasi
  - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
- Karantina Pertanian
  - Karantina Tumbuhan
  - Karantina Hewan
- Bimbingan Teknis
- Evaluasi
  
- PETERNAKAN
- Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - Perbibitan Ternak, Antara lain:
    - Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit

Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran  
Pakan Ternak  
Budidaya Ternak  
Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan  
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

Bimbingan Teknis

Evaluasi

## PERKEBUNAN

Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Tanaman Semusim

Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim  
Perbenihan Tanaman Semusim  
Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim  
Pemberdayaan Tanaman Semusim

Tanaman Rempah & Penyegar

Identifikasi dan Pendayagunaan

Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar

Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar

Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar

Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar

#### Tanaman Tahunan

Identifikasi dan  
Pendayagunaan Sumber Daya,  
Tanaman Tahunan

Perbenihan Tanaman Tahunan

Budidaya Tanaman Tahunan

Pemberdayaan dan Kelembagaan  
Tanaman Tahunan

#### Perlindungan Perkebunan

Identifikasi dan Pengendalian  
Organisme Pengganggu Tumbuhan  
Tanaman Semusim, Perlindungan  
Perkebunan

Identifikasi dan Pengendalian  
Organisme Pengganggu Tumbuhan  
Tanaman Rempah dan Penyegar

Identifikasi dan Pengendalian  
Organisme Pengganggu Tumbuhan  
Tanaman Tahunan

Dampak Perubahan Iklim dan  
Pencegahan Kebakaran

#### Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Pascapanen Tanaman Semusim,  
Rempah dan Penyegar

Pascapanen Tanaman Tahunan

Bimbingan Usaha dan  
Perkebunan Berkelanjutan

Gangguan Usaha dan Penanganan  
Konflik

#### Bimbingan Teknis Perkebunan

## Evaluasi Perkebunan

### PERINDUSTRIAN

Kebijakan di bidang Perindustrian yang  
dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

Iklm Usaha dan Kerja Sama

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis  
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Promosi Industri

Industri Manufaktur

Promosi Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis  
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Standarisasi dan Teknologi

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis  
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Hak dan Kekayaan Intelektual

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis  
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Industri Hijau

Industri Manufaktur

Industri Agro

Industri Unggulan Berbasis  
Teknologi Tinggi

Industri Kecil dan Menengah

Analisis Kerja Sama Industri Unggulan  
Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti

Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)  
Pengembangan Infrastruktur Pendukung  
Pengembangan Kawasan  
Industri

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri  
Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional  
Standarisasi

500.9.12.1 Standar

500.9.12.2 Penyiapan Penerapan

500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

500.9.13.1 Kebijakan Industri

500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif

500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan  
Hidup

500.9.14.1 Industri Hijau

500.9.14.2 Lingkungan Hidup

500.9.14.3 Energi

Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Pengkajian dan Penerapan

Kebijakan Teknologi Industri

Pengkajian dan Penerapan Inovasi

Teknologi Industri

Pengembangan Hak Kekayaan  
Intelektual

Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL

Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya  
Mineral yang dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Rekomendasi Kegeologian

Mitigasi Gunung Api, Gempa  
Bumi, Tsunami, dan Gerakan  
Tanah

Air Tanah dan Geologi Tata  
Lingkungan

Pertambangan

Panas Bumi

Geosains

Pengukuran Time Domain

Electromagnetic (TDEM)

Kelayakan Lingkungan

#### Penelitian Kegeologian

Administrasi pelaksanaan penelitian

Administrasi tenaga penelitian

Administrasi penggunaan peralatan  
penelitian

Log-book peralatan

survei/peralatan uji/kalibrasi

Hasil penelitian dan penyelidikan  
kegeologian

Sumber Daya Geologi

Air Tanah dan Geologi Tata  
Lingkungan

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana  
Geologi

Survei Geologi

#### Inventarisasi dan evaluasi kegeologian

Sumber Daya Geologi

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana  
Geologi

Air Tanah dan Geologi Tata  
Lingkungan

Survei Geologi

Konservasi

#### Administrasi Pelayanan Kegeologian dan

Penyajian Data dan  
Informasi

Peta potensi dan sebaran

Air Tanah dan Geologi Tata  
Lingkungan

Mitigasi Bencana Gunungapi,  
Gerakan Tanah, Gempa Bumi  
dan Tsunami, Semburan  
Lumpur/Gas serta kebakaran  
Batubara



Survei Geologi

Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Rencana Induk Jaringan Gas

Bumi

Rencana dan Realisasi Investasi

Penetapan Harga Minyak Mentah

Penetapan Bagii Hasil

Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Minyak dan Gas Bumi

Pelaksanaan Pemeriksaan dan

Pengujian PNBP

Verifikasi Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TKDN)

Rekomendasi

Kemampuan Produksi Barang dan

Jasa Dalam Negeri

Rencana Kebutuhan Impor

Barang (RKIB) dan Rencana

Impor Barang(RIB)

Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Penyiapan dan Penawaran Wilayah

Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi

(Konvensional dan Non

Konvensional)

Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi

(antara lain: Pemanfaatan Data

Migas untuk presentasi makalah,

publikasi makalah, pembukaan

data, Izin Pengiriman Data ke Luar

Negeri, Izin Pengiriman Data ke

Luar Negeri, Unitisasi Lapangan

Minyak dan Gas Bumi,

Rekomendasi Pengalihan Interest,

Rekomendasi Penyisihan Wilayah

Kerja Minyak dan Gas Bumi,

Penyiapan Dokumen Pengakhiran

Kontrak, Laporan Data Survei

Seismik, Laporan Data Pemboran

Sumur Eksplorasi per semester,  
Laporan Data Pemboran Sumur  
Eksplorasi Tahunan)

Eksplorasi Minyak dan Gas  
Bumi (antara lain: Rekomendasi  
Penggunaan Data Eksploitasi  
(publikasi makalah, analisa  
laboratorium, Reprocessing),  
Penetapan Pengusahaan Minyak  
Bumi dari Sumur Tua, Penetapan  
Pengusahaan Lapangan Produksi  
yang Dikembalikan Kepada  
Pemerintah, Buku Cadangan  
Minyak dan Gas Bumi, Data  
Cadangan Strategis/Penyangga  
Minyak dan Gas Bumi, Laporan  
Hasil Pemantauan Data Produksi  
Minyak dan Gas Bumi, Laporan  
Hasil Inventarisasi Mutu Minyak  
dan Gas Bumi)

Pengembangan lapangan Minyak  
dan Gas Bumi (POD)

Perpanjangan Kontrak KKS

Penetapan Alokasi dan Harga Gas  
Partisipasi Interest

Tumpang Tindih Lahan

Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Perumusan pedoman,  
prosedur, layanan serta  
pengawasan Usaha Pengolahan,

Pengangkutan,

Penyimpanan, dan Niaga Minyak  
Bumi dan Gas Bumi, Hasil  
Olahan dan Bahan Bakar Lain,

Antara lain: Pedoman  
dan Prosedur, Layanan  
Usaha

(Izin/rekomendasi/penandasahan)

, Pengawasan

Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

#### Teknik dan Lingkungan

Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain:

Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT

Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)

Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las

Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain:

Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain:

Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala

Teknik Tambang Hulu dan Hilir,  
Antara lain: Dokumen  
Permohonan Pengajuan  
persetujuan penunjukkan Calon  
kepala/wakil kepala teknik  
tambang minyak dan gas bumi,  
Surat Undangan Presentasi,  
Makalah Presentasi, Surat  
Persetujuan/ Pengesahan  
penunjukan kepala/wakil Kepala  
Teknik Tambang Minyak dan Gas  
Bumi

Penghargaan Keselamatan Kerja,  
Antara lain: surat Permohonan  
Mendapatkan Penghargaan, Surat  
Penugasan Dalam Rangka  
Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi  
Verifikasi, Salinan Tanda  
Penghargaan, Dokumen Pengajuan  
dan penilaian Tanda Penghargaan  
Keselamatan Minyak dan Gas  
Bumi

Usaha penunjang

Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Perencanaan Program Kerja  
Pembangunan Infrastruktur  
Minyak dan Gas Bumi

Pengadaan

Pembangunan Infrastruktur  
Minyak dan Gas Bumi

Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur  
Minyak dan Gas Bumi

Pengawasan dan Evaluasi  
Pembangunan Infrastuktur  
Minyak dan Gas Bumi

Penyiapan Program Energi Terbarukan dan  
Konservasi Energi

Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi  
Usul Program Aneka Energi  
Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi

500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT

500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT

500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi

500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT

Panas Bumi

- Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
- Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
- Rekomendasi Bahan Peledak
- Perizinan penggunaan gudang bahan peledak

Izin Tangki Bahan Bakar Cair

500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las

- Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
- Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
- Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
- Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
- Penetapan kapasitas usaha panas bumi
- Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi

Pelaksanaan Kerja Sama Panas

Bumi

Inventarisasi, Verifikasi dan

Evaluasi Obvitnas Bidang Panas

Bumi

Monitoring Pelaksanaan Program

Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat (PPM) pada Kegiatan

Pengusahaan Panas Bumi

Pembinaan dan Pengawasan Investasi

Panas Bumi

Bioenergi

Penerbitan Izin Usaha Niaga

Bahan Bakar Nabati (BNN)

Pengadaan Bahan Bakar Nabati

(BBN)

Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Import

Penetapan Indeks Harga Pasar

BBN(HIP BBN)

Evaluasi/Revisi HIP BBN 500.10.13.6

Database Pengusahaan Bioenergi

500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai

Pengelola Energi Biomassa atau

Biogas untuk Pembangkit Listrik

Penetapan Spesifikasi Bahan

Bakar Nabati

Usul Program Bioenergi

Pemerintah Daerah dan Lembaga

Aneka Energi

Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi 500.10.14.2

Penetapan Kapasitas Usaha

500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing

Rekomendasi Persetujuan

Perubahan Pemegang Saham

Persetujuan

Rencana

Impor Barang (RIB)

Konservasi Energi

Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi

Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE  
Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast

Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi

Penyusunan emisi energi gas rumah kaca

Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi

Profil investasi efisiensi energy 500.10.15.9

Investment Grade Audit (IGA)

500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang

EBTKE

Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

EBTKE

Usul Pembangunan

Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga

Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

Minyak dan Gas Bumi

Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur

Bidang EBTKE

Evaluasi Program Kerja

Bina Program Tenaga Listrik

Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain:

Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu Data dan Informasi Ketenagalistrikan

#### Bina Usaha Ketenagalistrikan

Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin Harga dan Subsidi Listrik Hubungan komersial tenaga listrik Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti



tingkat mutu pelayanan PT PLN  
(Persero)

## Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

### 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Penyiapan kompetensi dan  
pengawasan tenaga teknik  
ketenagalistrikan

Usaha penunjang  
ketenagalistrikan, Antara lain:  
Dokumen Izin Usaha Jasa  
Penunjang Tenaga Listrik  
(IUJPTL), Dokumen Izin  
Pemanfaatan Jaringan Tenaga  
Listrik untuk Kepentingan  
Telematika (IPJ Telematika),  
Dokumen Penandasahan Rencana  
Impor Barang (RIB)

Perlindungan lingkungan  
ketenagalistrikan, Antara lain:  
Dokumen forum keselamatan  
instalasi pemanfaatan tenaga listrik,  
Dokumen pelaksanaan pengelolaan  
lingkungan hidup sektor  
ketenagalistrikan,

### Sertifikasi

Dokumen Sertifikasi Produk  
peralatan dan pemanfaatan tenaga  
listrik

Dokumen Penunjukan Lembaga  
Sertifikasi Kompetensi (LSK)

Dokumen Penerbitan Sertifikasi  
Laik Operasi (SLO) Instalasi  
Tenaga Listrik

Dokumen Pembinaan dan  
pengawasan sertifikat laik operasi  
(SLO) instalasi tenaga listrik

Registrasi Sertifikasi

Akreditasi Ketenagalistrikan

Standarisasi Kompetensi

Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang  
Ketenagalistrikan

Perumusan rancangan SNI bidang  
ketenagalistrikan

Forum konsensus rancangan SNI  
bidang ketenagalistrikan

Program pemberlakuan SNI wajib  
bidang ketenagalistrikan

Dokumen pengawasan penerapan  
SNI wajib bidang ketenagalistrikan

Standardisasi Usaha Penunjang

Ketenagalistrikan

Klasifikasi usaha penunjang

ketenagalistrikan

Kualifikasi usaha penunjang  
ketenagalistrikan

Dokumen penunjukan LIT  
(Lembaga Inspeksi Teknis)

Laporan berkala pemegang  
penunjukan LIT

Laporan hasil pengawasan  
penunjukan

Bina Program Mineral dan Batubara

Penyiapan dan Perencanaan  
Program Mineral dan Batubara  
Rencana Induk Mineral dan  
Batubara

Pengembangan Investasi dan  
Kerja Sama Bidang Mineral dan  
Batubara

Data dan Informasi Mineral dan Batubara

Pelaporan Program Mineral dan  
Batubara

Perencanaan, Penyiapan dan  
Penawaran Wilayah Kerja (WK)

Mineral dan Batubara melalui lelang reguler

Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara

Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara

Pengembangan dan

Pemanfaatan Mineral dan Batubara

Pembinaan Pengusahaan Mineral

500.10.26.1 Ketenagakerjaan

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral

Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral

Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)

Perizinan usaha pertambangan mineral

Kontrak Karya (KK)

Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)

Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral

Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)

Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral

Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampel dengan rancangan akhir

Pelaporan usaha pertambangan mineral

Penghargaan usaha pertambangan mineral

Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral

#### Pembinaan Pengusahaan Batubara

500.10.27.1

Ketenagakerjaan

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang

Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara

Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara

500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara

500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara

Perizinan Usaha Pertambangan Batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)

Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

Teguran kepada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara

Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir

Pelaporan usaha pertambangan batubara

Penghargaan usaha pertambangan batubara

Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan

Standar Nasional Indonesia)/

RSKKNi (Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia), Antara lain: Draft

Rancangan, Rancangan Standar

Nasional

Pengawasan Standardisasi

Persetujuan Penunjukkan  
Kepala/Wakil Kepala Teknik  
Tambang

Pengawasan Keselamatan Kegiatan  
dan Keselamatan Pekerja, Antara  
lain: Laporan Kecelakaan  
Tambang/Statistik hingga Laporan  
Hasil Pemeriksaan Keselamatan  
dan Kesehatan Kerja (K3)

Pemeriksaan teknis dan  
pengujian instalasi dan peralatan  
tambang, Antara lain: Pemeriksaan  
dan Pengujian Instalasi dan  
Peralatan

Analisis Mengenai Dampak  
Lingkungan (AMDAL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan  
(UKL) dan Upaya Pemantauan  
Lingkungan (UPL)

Rekomendasi bahan kimia

Pengawasan Pelaksanaan  
Pengelolaan Pemantauan  
Lingkungan, Antara lain: Laporan  
Pelaksanaan Rencana  
Pengelolaan Lingkungan  
(RKL)/Rencana Pemantauan  
Lingkungan (RPL) hingga Surat  
Penetapan Jaminan Pasca  
Tambang

Laporan berkala teknik dan  
lingkungan pertambangan/  
laporan tahunan, Antara lain:  
Laporan Bulanan Terjadinya  
Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan  
reklamasi

Pemberian Penghargaan, Antara  
lain: Pemberian Penghargaan  
Lingkungan Pertambangan,

Pemberian Penghargaan  
Keselematan Kerja, Dokumen  
Pengajuan dan Penilaian Tanda  
Penghargaan lingkungan  
Pertambangan, Dokumen  
Pengajuan dan Penilaian Tanda  
Penghargaan Keselamatan  
Pengawasan lingkungan  
pertambangan  
Usaha Jasa Mineral dan Batubara  
Pembinaan dan pengawasan  
usaha jasa mineral dan batubara  
Rekomendasi Teknis, Antara lain:  
Pengajuan Rekomendasi Teknis,  
Hasil Evaluasi  
Persetujuan Teknis, Antara lain:  
Pengajuan Persetujuan Teknis,  
Hasil Evaluasi  
Pengawasan Teknis  
Pengawasan Konservasi Mineral  
dan Batubara  
Peminaan Teknik dan Lingkungan  
Mineral dan Batubara, Antara  
lain: Sosialisasi Standardisasi,  
Bimbingan Teknis

#### Program Penelitian dan Pengembangan

Rencana Penelitian dan  
Pengembangan  
Pengembangan dan inovasi  
Dokumen  
penerapan/pemanfaatan/pendayagu  
naan/replikasi/prototype hasil  
penelitian/ pengkajian/  
pengembangan/inovasi  
Advokasi dan fasilitasi penelitian,  
pengembangan dan inovasi  
Diseminasi hasil penelitian,  
pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Pembinaan

penelitian/Pengembangan,

pengkajian, dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Jaringan Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Data dan informasi hasil

penelitian, pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Master proceeding/ jurnal

penelitian, pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Hak atas kekayaan intelektual

(HaKI)

Forum komunikasipenelitian,

pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Layanan jasa penelitian,

pengembangan, penerapan IPTEK

Sertifikasi personil peneliti

bidang Sumber Daya Mineral

Sarana Litbang

Administrasi penggunaan peralatan

Log-book Peralatan

Survei/Peralatan Uji Kalibrasi

Afiliasi

Proyek Percontohan

Promosi dan Layanan Jasa

Teknologi

Pembinaan Penelitian dan

Pengembangan

Penyajian Informasi

Penelitian dan Pengembangan Kegeologian



Pemetaan dan penelitian  
geologi, geokimia, dan geofisika  
kelautan

Energi Kelautan dan Kewilayahan  
Penelitian Energi dan kewilayahan  
pantai

Penelitian sumber daya energi dan  
mineral kelautan

Penelitian Sumber Daya Mineral  
Kelautan

#### Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Minyak dan Gas Bumi

Teknologi Eksplorasi

Teknologi Eksploitasi

Laboratorium

Study

Teknologi Proses

Teknologi Aplikasi

Produk

Teknologi Gas

#### Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Mineral Batubara

Teknologi Eksploitasi Tambang dan  
Pengolahan Sumber Daya

Teknologi Pengolahan dan  
Pemanfaatan mineral

Teknologi Pemanfaatan Batubara

#### Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

Energi baru terbarukan 500.10.36.2

Teknologi Ketenagalistrikan

500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan

Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik  
Tenaga Sampah) dan Konservasi  
Energi

PERHUBUNGAN

Kebijakan di bidang Perhubungan yang  
dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

#### Jaringan Prasarana dan Pelayanan

Penentuan lokasi terminal barang  
tipe pengumpul dan tipe  
penunjang

Penentuan lokasi terminal  
penumpang tipe A, tipe B, dan tipe  
C

Penetapan lokasi terminal barang  
utama

Standar pelayanan minimal  
pengoperasian terminal

Jaringan trayek angkutan antar  
kota/provinsi

Jaringan lintas pada jaringan  
jalan primer

Penetapan kelas jalan primer

Kualifikasi teknis petugas terminal

Jaringan transportasi jalan  
sekunder

#### Pengembangan Transportasi Jalan

Sistem informasi dan komunikasi  
lalulintas dan angkutan jalan

Pengembangan transportasi jalan

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengesahan hasil uji tipe  
kendaraan bermotor

Sertifikasi uji tipe kendaraan  
bermotor

Sertifikasi tenaga penguji  
kendaraan bermotor

Akreditasi unit pengujian  
kendaraan bermotor

#### Teknologi Kendaraan Bermotor

Sertifikasi rancang bangun dan  
rekayasa kendaraan bermotor

Pelaksanaan kalibrasi

peralatan uji kendaraan bermotor

Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

#### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

#### Perlengkapan Jalan

Pedoman teknis perlengkapan jalan  
Penimbangan kendaraan bermotor di jalan

Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor

Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor

Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

#### Angkutan Penumpang

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi

Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara

Izin trayek antar kota antar provinsi

Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi

Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum

Pemberian subsidi angkutan umum  
Angkutan perintis  
Penghargaan perusahaan  
angkutan umum

#### Angkutan Barang

Sistem informasi dan komunikasi  
lalulintas dan angkutan jalan  
Tarif angkutan barang  
Izin operasi angkutan barang  
tertentu  
Pembinaan angkutan barang  
Izin dispensasi angkutan jalan

#### Monitoring Operasional

Pengendalian operasional Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan  
Pengawasan, penertiban dan  
pemberian sanksi administratif  
terhadap pelanggaran operasional  
kendaraan angkutan umum yang  
menjadi kewenangan  
Berkas Pelanggaran Perda

#### Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pedoman Teknis  
Penyidikan pelanggaran Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan oleh  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
(PPNS)  
Bimtek PPNS  
Pengusulan pengangkatan dan  
pemberhentian Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil (PPNS)

#### Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan

Penyeberangan  
Pendataan jaringan transportasi  
sungai, danau, dan  
penyeberangan

Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan

Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan  
Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan

Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai,

danau dan penyeberangan

Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan  
Penyeberangan

Manajemen lalu lintas

Tata cara berlalu lintas di  
sungai, danau dan penyeberangan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
bidang lalu lintas dan angkutan  
sungai & danau

Sertifikasi inspektur sungai dan  
danau dan pejabat

pemberangkatan angkutan sungai  
dan danau

Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai,  
Danau dan Penyeberangan

Pengerukan alur pelayaran  
sungai, danau dan kolam  
pelabuhan penyeberangan

Penetapan kelas alur dan peta alur  
pelayaran sungai dan danau

Perambuan sungai, danau dan  
penyeberangan

Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau  
dan Penyeberangan

Penyelenggaraan angkutan sungai,  
danau dan penyeberangan

Persetujuan operasi kapal  
penyeberangan di lintas nasional  
dan internasional

Tarif dan Keperintisan

Perhitungan tarif, pemantauan  
tarif angkutan dan jasa pelabuhan  
sungai, danau dan penyeberangan

Kriteria dan pelaksanaan  
pelayanan keperintisan

Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan Transportasi

Perkotaan 500.11.22.2

Transportasi

perkotaan yang

berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan

500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

#### Lalu Lintas Perkotaan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

#### Angkutan Perkotaan

Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek

Jaringan trayek perkotaan

Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

#### Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan

500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan

Perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi

provinsi

## Dampak Transportasi Perkotaan

Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan  
Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

Masterplan transportasi perkotaan

## Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

Monitoring dan evaluasi data Kecelakaan

Kualifikasi unit pengkajian 500.11.27.3

## Pengembangan sistem informasi

manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

## Pengembangan Keselamatan

Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

Harmonisasi kebijakan

## Promosi dan Kemitraan Keselamatan

Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

Kemitraan keselamatan antar



lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

#### Bina Keselamatan Angkutan Umum

Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum  
Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau

#### Audit Keselamatan

Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia  
Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan  
Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

#### Inspeksi Keselamatan

Pedoman keselamatan  
Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan  
Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

#### Parkir

Surat Tugas Juru Parkir  
Izin tempat khusus parkir swasta  
Surat Tugas TKP Pemerintah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kebijakan di bidang Komunikasi dan  
Informatika yang dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah

Telekomunikasi

Layanan Jaringan Telekomunikasi  
Layanan Jasa Telekomunikasi  
Penomoran Telekomunikasi dan  
Informatika  
Kelayakan Sistem Telekomunikasi

Penyiaran

Pemetaan Penyelenggaraan Radio  
dan Televisi  
Database Penyelenggaraan Radio  
dan Televisi

Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan

Kewajiban Universal  
Telekomunikasi Khusus  
Pemerintah Daerah  
Telekomunikasi Khusus Non  
Pemerintah Daerah  
Layanan Khusus Penyiaran  
Pelayanan Kewajiban Universal  
Pengembangan Infrastruktur

Pengendalian Informatika

Monitoring dan Evaluasi Jaringan  
Telekomunikasi  
Monitoring dan Evaluasi Jasa  
Telekomunikasi  
Monitoring dan Evaluasi Penyiaran  
Pencegahan dan Penertiban

e- Government

Tata Kelola e-Government  
Teknologi dan Infrastruktur e-  
Government  
Interoperabilitas dan  
Interkonektivitas e-Government  
Aplikasi Layanan Pemerintahan  
Aplikasi Layanan Publik

e- Business

Tata Kelola e-Business

Teknologi dan Infrastruktur e-Business

Interoperabilitas dan

Interkonektivitas e-Business

Aplikasi Layanan e-Business

Pemberdayaan Informatika Masyarakat

Pemberdayaan Informatika

Masyarakat Perkotaan

Pemberdayaan Informatika

Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Industri Informatika

Industri Infrastruktur dan

Layanan Aplikasi Informatika

Industri Perangkat Informatika

Pengguna

Industri Perangkat Lunak

Industri Konten Multimedia

Keamanan Informasi

Tata Kelola Keamanan Informasi 500.12.10.2

Teknologi Keamanan Informasi 500.12.10.3

Monitoring, Evaluasi dan Tanggap

Darurat Keamanan Informasi

500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan

500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi

Komunikasi Publik

Tata Kelola Komunikasi

Publik

Pengelolaan Opini Publik

Layanan Komunikasi Publik

Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Informasi Politik, Hukum, dan  
Keamanan

Informasi Perekonomian

Informasi Kesejahteraan

Rakyat

Pengelolaan Media Publik

Media Cetak

Media Online

Media Luar Ruang dan Audio  
Visual

Kemitraan Komunikasi

Kemitraan Pemerintah dan  
Lembaga Negara

Kemitraan Media dan Dunia Usaha

Kemitraan Organisasi

Kemasyarakatan dan Profesi

Infrastruktur Informatika

Jaringan

Piranti Teknologi

Informatika

Keamanan Informatika

Sistem dan Data

Portal dan Konten

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengembangan Aplikasi

Pusat Kerjasama

Kerja Sama daerah

Kerja Sama Bilateral

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

500.12.18.1 Pelayanan

Informasi 500.12.18.2

Hubungan Masyarakat

500.12.18.3 Bimbingan Teknis

Evaluasi

PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF

Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Pengembangan Destinasi Wisata

Perancangan Destinasi dan

Investasi Pariwisata

Pengembangan Daya Tarik Wisata

Industri Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat

Destinasi Pariwisata

Pengembangan Wisata Minat  
Khusus, Konvensi, Insentif, dan  
Event

Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Pasar dan  
Informasi Pariwisata  
Promosi Pariwisata Luar Negeri  
Promosi Pariwisata Dalam Negeri  
Pencitraan Indonesia

Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

Pengembangan industri Perfilman  
Pengembangan Seni Pertunjukan  
dan Industri Musik  
Pengembangan Seni Rupa

Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan

IPTEK

Pengembangan Ekonomi Kreatif  
Berbasis Media

Desain dan Arsitektur

Kerjasama dan Fasilitas

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

Penelitian dan Pengembangan  
Kebijakan Kepariwisata

Penelitian dan Pengembangan  
Kebijakan Ekonomi Kreatif

Pengembangan SDM

Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kompetensi Kepariwisata dan  
Ekonomi Kreatif

STATISTIK

Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan  
oleh Pemerintah Daerah

Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

Perencanaan

Persiapan, Antara lain:

Penyusunan rancangan organisasi

kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba Pelaksanaan Lapangan Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Sensus

Diseminasi hasil sensus Survei  
Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan Diseminasi hasil Survei

Konsolidasi Data Statistik

Kompilasi Data

Analisis data

Penyusunan Publikasi

Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

## KETENAGAKERJAAN

Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan Tenaga Kerja

Perusahaan Pemerintah

Perencanaan Tenaga Kerja

Perusahaan Swasta

Pengembangan Standarisasi Kompetensi

Penerapan Standar Kompetensi

Pengembangan

Standarisasi Kompetensi

Pengembangan Program Pelatihan  
Ketenagakerjaan

Pengembangan Program Pelatihan  
Produktivitas dan Kewirausahaan

Pengembangan Program Pelatihan  
Ketrasmigrasian

Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja

Akreditasi dan Sistem Informasi  
Kelembagaan

Pengembangan Sarana dan  
Fasilitas Lembaga Pelatihan

Pengembangan Standar Mutu  
(PSM) Lembaga Pelatihan

Sistem Pendanaan dan Kerjasama  
Antar Lembaga

Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan

Instruktur dan PSM Lembaga  
Pelatihan Pemerintah

Instruktur Lembaga Pelatihan  
Swasta

Tenaga Pelatihan

Sistem Informasi Instruktur, PSM,  
dan Tenaga Pelatihan

Bina Pemagangan

Pemagangan Dalam Negeri

Pemagangan Luar Negeri

Perizinan dan Advokasi Pemagangan

Promosi dan Jenjang Pemagangan

Produktivitas dan Kewirausahaan

Pengembangan

Promosi dan Kerjasama

Produktivitas dan Kewirausahaan

Pengembangan Sistem dan  
Peningkatan Produktivitas

Pengembangan Pengukuran dan  
Kajian Produktivitas



Pengembangan Kewirausahaan  
Pengembangan Pasar Kerja  
    Informasi Pasar Kerja  
    Analisis Pasar Kerja  
    Bursa Kerja  
    Analisis Jabatan  
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri  
    Antar Kerja  
    Penempatan Tenaga Kerja Khusus  
    Penyuluhan dan Bimbingan  
    Jabatan  
    Pemberdayaan Pengantar Kerja  
Perluasan Kesempatan Kerja dan  
    Pengembangan Tenaga Kerja  
    Sektor Informal 500.15.10.1  
        Tenaga Kerja  
        Mandiri dan  
        Sektoral Informal  
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya  
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna  
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan  
    Kerjasama Antar Lembaga  
Standardisasi Profesi  
    Sistem Informasi dan Registrasi  
    Pembakuan Akreditasi  
Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis  
    Diskriminasi  
    Peraturan Perusahaan dan  
    Perjanjian Kerjasama Bersama  
    Perjanjian Kerja  
    Kesejahteraan Pekerja  
    Analisis Diskriminasi Syarat Kerja  
Kelembagaan dan Pemasarakatan  
    Hubungan Industrial  
    Organisasi Pekerja dan Pengusaha  
500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial  
500.15.13.3 Pemasarakatan Hubungan  
    Industrial  
Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan  
    Hubungan Industrial

Pengupahan  
Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Dalam Hubungan Kerja  
Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian  
Hubungan Industrial  
Pencegahan Perselisihan  
Hubungan Industrial  
Penyelenggaraan Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial  
Pemberdayaan Kelembagaan dan  
Tenaga Penyelesaian Perselisihan  
Hubungan Industrial  
Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial  
Tenaga Kerja  
Pengawasan Norma Kerja  
Pengawasan Norma Hubungan  
Kerja dan Perlindungan Berserikat  
Pengawasan Norma Penempatan  
dan Latihan Tenaga Kerja  
Pengawasan Norma Kerja  
Perempuan dan Anak  
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja  
Perempuan  
500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak  
500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral  
500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan  
dan Anak  
Pengawasan Norma Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja  
Pengawasan Norma Mekanik,  
Pesawat Uap dan Bejana Tekan  
Pengawasan Norma Konstruksi  
Bangunan, Listrik dan  
Penanggulangan Kebakaran  
Pengawasan Norma Kesehatan Kerja  
Pengawasan Norma Lingkungan  
Kerja dan Bahan Berbahaya  
Pengawasan Norma

Kelembagaan, Keahlian dan Sistem  
Manajemen K3

Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan  
Bina Penegakan Hukum

Pemeriksaan Norma

Ketenagakerjaan

Penyidikan Norma Ketenagakerjaan

Pengembangan Penyidik Pegawai

Negeri Sipil

Kerjasama Penegakan Hukum

Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) 500.15.21.1 Analisis dan

Standardisasi bidang K

3

Hasil kajian, perekayasaan dan

penerapan teknologi dan alih

teknologi K 3

Bimbingan Teknis dan Evaluasi

Pengkajian K 3

Bimbingan Teknis dan Evaluasi

Pelayanan K3

Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.1 Program,

Analisis dan

Standardisasi Pengembangan SDM

dan Kompetensi K3

Penyebarluasan Informasi

Pengembangan SDM dan

Kompetensi K3

Kerjasama Tingkat Nasional

Bidang Pengembangan SDM dan

Kompetensi K3

Kerjasama Tingkat Regional

Bidang Pengembangan SDM dan

Kompetensi K3

Kerjasama Tingkat Internasional

Bidang Pengembangan SDM dan

Kompetensi K3

Bimbingan Teknis dan Evaluasi

Pengembangan SDM dan  
Kompetensi K3

## PENANAMAN MODAL

Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang  
dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

Perencanaan Penanaman Modal

Perencanaan Industri Agribisnis  
dan Sumber Daya Alam Lainnya  
Perencanaan Industri Manufaktur  
Perencanaan Jasa dan Kawasan  
Perencanaan Infrastruktur

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Deregulasi Penanaman Modal  
Pengembangan Potensi Daerah  
Pemberdayaan Usaha  
Pemberdayaan Usaha Pembinaan  
dan Penyuluhan  
Pemberdayaan Usaha Kemitraan  
Usaha  
Pemberdayaan Usaha Pelayanan  
Usaha

Promosi Penanaman Modal

Pengembangan Promosi  
Analisis Strategi Promosi  
Fasilitasi Promosi Luar Negeri  
Promosi Sektoral  
Fasilitasi Promosi Daerah  
Pameran dan Sarana Promosi

Kerja Sama Penanaman Modal

Kerja Sama Bilateral dan  
Multilateral  
Kerja Sama Regional  
Kerja Sama Dunia Usaha  
Internasional

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemantauan Penanaman Modal  
Data Realisasi Penanaman Modal

Bimbingan Sosialisasi Ketentuan  
Penanaman Modal  
Fasilitasi Penyelesaian Masalah  
Pengawasan Penanaman Modal  
Pencabutan/Pembatalan Perizinan  
Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Aplikasi  
Pelayanan Perizinan  
Pelayanan Konsultasi Perizinan  
Pelayanan Non Perizinan  
Pelayanan Fasilitas

PERTANAHAN

Kebijakan di bidang Pertanahan yang  
dilakukan oleh  
Pemerintah Daerah

Pengadaan dan Penataan Administrasi  
Pertanahan

Fasilitasi Pengadaan Tanah  
Pembinaan dan Pengendalian  
Administrasi Pertanahan  
Data dan Informasi Pertanahan  
Advokasi dan Pengendalian

Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah  
Penatagunaan Tanah  
Data dan Pemetaan Tematik  
Penguatan Atas Tanah

Sengketa Tanah

Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa  
Advokasi dan Pengendalian

TRANSMIGRASI

Kebijakan di bidang Transmigrasi yang  
dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Fasilitasi Pengadaan Tanah  
Pengurusan Legalitas Tanah  
Dokumentasi Pertanahan

Advokasi Pertanahan

Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur

- Kawasan Transmigrasi
- Penyiapan Lahan
- Penyiapan Sarana
- Penyiapan Prasarana
- Evaluasi Kelayakan Permukiman

Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

- Penyiapan Calon Transmigrasi
- Penyiapan Perpindahan
- Pelaksanaan Perpindahan
- Penataan dan Adaptasi

Partisipasi Masyarakat

- Promosi dan Motivasi
- Kerjasama Kelembagaan
- Kerjasama Antar Daerah
- Pelayanan Investasi

Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

- Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- Bina Sistem Informasi
- Perencanaan Pengembangan Kawasan
- Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat

- Bantuan Pangan dan Kesehatan
- Fasilitas Sosial Budaya
- Pengembangan Kelembagaan
- Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

Pengembangan Usaha

- Kewirausahaan
- Produksi

Pengolahan Hasil dan Pemasaran  
Lembaga Ekonomi dan permodalan  
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan  
Analisis dan Standarisasi Sarana  
dan Prasarana  
Pengembangan Sarana  
Pengembangan Prasarana  
Evaluasi Pengembangan Sarana  
dan Prasarana  
Penyerasian Lingkungan  
Persiapan Pengelolaan dan  
Pemantauan Lingkungan  
Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan  
Evaluasi Perkembangan  
Permukiman Transmigrasi  
Evaluasi Perkembangan Pusat  
Pertumbuhan

## 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

### PEKERJAAN UMUM

Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang  
dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

#### Penatagunaan Sumber Daya Air

Perencanaan Wilayah Sungai  
Kelembagaan  
Pemanfaatan Sumber Daya Air  
Hidrologi dan Lingkungan Sumber  
Daya Air  
Pengaturan dan Pemantauan

#### Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Perencanaan Pengelolaan Sumber  
Daya Air  
Manajemen Mutu  
Informasi dan Data Sumber Daya  
Air  
Keterpaduan Pemrograman

#### Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sungai dan Pantai

Pengelolaan Irigasi dan Rawa  
Pengelolaan Bendungan, Danau,  
Situ, dan Embung  
Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku  
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air  
Operasi dan Pemeliharaan Sungai  
dan Pantai  
Operasi dan Pemeliharaan Irigasi  
dan Rawa  
Operasi dan Pemeliharaan  
Bendungan, Danau, Situ, dan  
Embung  
Operasi dan Pemeliharaan Air  
Tanah dan Air Baku  
Operasi dan Pemeliharaan  
Pengendalian Lumpur Sidoarjo  
Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal  
Lingkup Nasional)  
Perencanaan                      Pengendalian  
Lumpur Sidoarjo  
Pemrograman                      Pengendalian  
Lumpur Sidoarjo  
Pelaksanaan Pengendalian Lumpur  
Sidoarjo  
Pengendalian Dampak Sosial,  
Ekonomi, dan Lingkungan akibat  
Lumpur Sidoarjo  
Sistem Manajemen Keselamatan  
dan Kesehatan Kerja  
Pengembangan Jaringan Jalan  
Keterpaduan Perencanaan  
Sistem Jaringan Jalan  
Lingkungan dan Keselamatan  
Jalan  
Pembangunan Jalan  
Standar dan Pedoman  
Manajemen Konstruksi  
Pengelolaan Geodemetrik,



Perkerasan, dan Drainage  
Pengelolaan Geoteknik dan  
Manajemen Lereng

Preservasi Jalan

Standar dan Pedoman  
Perencanaan Teknis  
Teknik Rekonstruksi  
Teknik Pemeliharaan Jalan

Pengelolaan Jembatan

Standar dan Pedoman  
Perencanaan Teknis  
Teknik Jembatan  
Teknik Terowongan dan Jembatan  
Khusus

Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan,

Perkotaan, dan Fasilitas  
Jalan Daerah  
Bimbingan Teknik Jalan Daerah  
Pengembangan Jalan Metropolitan  
dan Kota Besar  
Pembinaan Teknik Jalan Bebas  
Hambatan

Pengaturan Jalan Tol

Persiapan pengusaha jalan tol  
Pengadaan Investasi Jalan Tol  
Teknik Pengaturan Jalan Tol  
Pengambilalihan hak pengusaha  
jalan tol

Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Keterpaduan Perencanaan dan  
Kemitraan  
Keterpaduan Pembiayaan dan  
Pelaksanaan

Pengembangan Kawasan Permukiman

Perencanaan Teknis  
Kawasan Permukiman Perkotaan  
Kawasan Permukiman Pedesaan  
Kawasan Permukiman Khusus  
Kelembagaan

Pembinaan Penataan Bangunan

Perencanaan Teknis

Penataan Bangunan Gedung

Pengelolaan Rumah Negara

Penataan Bangunan dan

Lingkungan Khusus

Kelembagaan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Perencanaan Teknis

Sistem Penyediaan Air Minum

Perkotaan

Sistem Penyediaan Air Minum

Pedesaan

Sistem Penyediaan Air Minum

Khusus

Kelembagaan

Peningkatan Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan Laboratorium dan

Bengkel Kerja

Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman

Perencanaan Teknis

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan

Penyehatan Lingkungan

Permukiman Khusus

Kelembagaan

Pengelolaan Laboratorium dan

Bengkel Kerja

Pemantauan dan Evaluasi

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PEMUKIMAN

Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman yang

dilakukan oleh Pemerintah

Daerah

Perencanaan Pembiayaan Perumahan

Keterpaduan Perencanaan

Strategi Pembiayaan dan Analisa  
Pasar Perumahan  
Kemitraan

Pola Pembiayaan Perumahan

Pola Pembiayaan Perumahan  
Rumah Umum  
Pola Pembiayaan Perumahan  
Rumah Swadaya dan Mikro  
Perumahan  
Pola Investasi Perumahan

Pendayagunaan Sumber Pembiayaan

Perumahan  
Sumber Pembiayaan Primer  
Sumber Pembiayaan Sekunder  
Sumber Tabungan Perumahan  
Pembiayaan Lainnya  
Sistem Pembiayaan Perumahan  
Pengelolaan Dana Pembiayaan  
Perumahan

Perencanaan Penyediaan Perumahan

Keterpaduan Perencanaan  
Analisa Teknik  
Rencana Pengembangan  
Lingkungan Hunian  
Kemitraan dan Kelembagaan

Penyediaan Rumah Susun

Perencanaan Teknik  
Penyediaan  
Penghunian, Pengalihan, dan  
Pemanfaatan  
Pengelolaan

Penyediaan Rumah Khusus

Perencanaan Teknik  
Penyediaan dan Pengelolaan  
Rumah Tapak Khusus  
Bimbingan teknis dan supervisi  
Penyelenggaraan Bantuan Rumah  
Swadaya

Perencanaan Teknik  
Fasilitas Backlog Rumah Swadaya  
dan Rumah Tidak Layak Huni  
Pelaksanaan Bantuan Simultan  
Penyediaan Rumah Umum dan Komersial  
Perencanaan Teknik  
Pemberian Bantuan Rumah Umum  
Fasilitasi Hunian Berimbang  
Fasilitasi Penyediaan Lahan  
Perumahan

Investasi Infrastruktur  
Pelaksanaan Kebijakan Investasi  
Infrastruktur  
Sinkronisasi Investasi Infrastruktur  
Fasilitasi dan Mitigasi Risiko  
Investasi Infrastruktur  
Pasar Infrastruktur

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
Sistem Penyelenggaraan  
Kontrak Konstruksi  
Konstruksi Berkelanjutan  
Manajemen Mutu

Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  
Kelembagaan  
Material dan Peralatan Konstruksi  
Teknologi Konstruksi dan Produksi  
Dalam Negeri  
Usaha Jasa Konstruksi

Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi  
Standar dan Materi Kompetensi  
Penerapan Kompetensi  
Pengembangan Profesi Jasa  
Konstruksi  
Pengembangan Produktivitas

Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa  
Konstruksi  
Peningkatan Kerjasama  
Pemberdayaan Jasa Konstruksi

## Peningkatan Jasa Konstruksi

Koordinasi dan Sinkronisasi

Rencana Kerja

Pelaksanaan Pengendalian Mutu

## Penerapan Teknologi Konstruksi

Koordinasi, Sinkronisasi, dan  
Kerjasama Penerapan Teknologi  
Konstruksi

Pengembangan Materi

Pendayagunaan Material dan  
Peralatan Konstruksi

Rencana Pengembangan Infrastruktur  
Pekerjaan Perumahan Rakyat  
(PUPR)

Antar Sektor

Antar Wilayah

## Pengembangan Kawasan Strategis

Keterpaduan Infrastruktur

Kawasan Strategis

Pengembangan Infrastruktur

Antarkawasan Strategis

## Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pengembangan Infrastruktur

Kawasan Metropolitan

Pengembangan Infrastruktur

Kawasan Kota Besar dan Kota  
Baru

Pengembangan Infrastruktur

Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan

Analisa Manfaat dan Skema

Pembiayaan

Sinkronisasi Program dan

Pembiayaan Infrastruktur

Perumahan Rakyat (PUPR)

## Pemantauan dan Evaluasi

TATA RUANG (TATA KOTA)

Kebijakan di bidang Tata Ruang yang

dilakukan Pemerintahan

Kabupaten Brebes

## Perencanaan

Tata Ruang Wilayah Kabupaten  
(RT/RW)  
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  
Rencana Tata Ruang Strategis  
Kabupaten  
Rencana Tata Bangun Lingkungan  
(RTBL)  
Rencana Pengembangan Sistem  
Sarana dan Prasarana Kabupaten  
Rencana Teknis Prasarana Kota  
Rencana Teknis Rencana  
Peremajaan dan Pengembangan  
Kotas Prasarana Kota

## Pemanfaatan dan Pengendalian

Evaluasi dan Pengawasan Penata  
Ruang  
Ijin Pemanfaatan Ruang  
Pembatalan Ijin Pemanfaatan  
Ruang

## Pemetaan

Peta Dasar  
Survey Pemetaan Ruang Darat  
Survey Pemetaan Ruang Air  
Survey Pemetaan Ruang Udara  
LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang  
dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam  
dan Lingkungan Hidup

Inventarisasi, Penerapan ekoregion,  
dan rencana perlindungan dan  
pengelolaan Lingkungan  
Evaluasi Pemanfaatan Sumber  
Daya Alam

## Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Evaluasi Penerapan  
Perencanaan Lingkungan Hidup

Ekonomi Lingkungan

Dampak Lingkungan

Bimtek Dampak Lingkungan

Penerapan sistem kebijakan

Dampak lingkungan

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan dan Pengawasan

Manufaktur Prasarana dan Jasa

Pertambangan Energi, Minyak dan  
Gas

Agro Industri dan Usaha Skala  
Kecil

Udara Sumber Bergerak

Evaluasi dan Pengembangan

Manufaktur, Prasarana, dan Jasa  
Pertambangan Energi, Minyak dan  
Gas

Agro Industri dan Usaha Skala  
Kecil

Udara Sumber Bergerak

Keanekaragaman Hayati dan pengendalian

Kerusakan Lahan

Pengembangan

Pemanfaatan

Pengelolaan Sumber Daya Genetik

Keamanan Hayati

Pengendalian kerusakan Lahan

Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Kerusakan Ekosistem

Rawa

Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer

Perangkat mitigasi

Inventarisasi Emisi Gas Rumah

Kaca

Pengendalian Bahan Perusak Ozon

Pengendalian Kerusakan Akibat

Kebakaran Hutan dan Lahan

Adaptasi Perubahan Iklim

Perangkat Adaptasi Perubahan  
Iklim antara lain: Pengembangan  
perangkat Adaptasi  
Perubahan Iklim, Pemantauan  
dan Evaluasi Adaptasi  
Perusahaan Iklim

Kerentanan Perubahan Iklim

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Registrasi dan Notifikasi

Pemantauan Bahan

Berbahaya dan Beracun

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan

Berbahaya dan beracun

Pengumpulan dan pemanfaatan

Pengangkutan dan Pengolahan

Penimbunan dan Dumping

Notifikasi dan Rekomendasi

Limbah Lintas batas

Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan

Kontaminasi Limbah B3

Pemantauan

Tanggap darurat dan pemelihan

Kontaminasi

Pengelolaan Sampah

Pembatasan sampah

Daur Ulang dan Pemanfaatan

Sampah

Pembentukan Dewan Adipura

Penetapan pemenang adipura

Hukum Administrasi Lingkungan

Pengelolaan dan pengembangan  
pengaduan

Penataan hukum administrasi  
lingkungan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Penyelesaian sengketa Melalui

Pengadilan



- Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
- Penegakan hukum pidana lingkungan
  - Penyidikan
  - Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
  - Koordinasi pembinaan penyidik PNS
- Komunikasi Lingkungan
  - Pengembangan Komunikasi
  - Publikasi dan Kampanye
- Penguatan Inisiatif Masyarakat
  - Komunitas Pendidikan Lingkungan
  - Kearifan Lingkungan
- Peningkatan Peran Masyarakat
  - Masyarakat Perkotaan
  - Masyarakat Pedesaan
- Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
  - Organisasi Sosial Masyarakat
  - Organisasi Profesi Dunia Usaha
- Data dan Informasi Lingkungan
  - Pengelolaan Data
  - Pengelolaan Informasi
  - Pengembangan Perangkat Lunak
  - Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- Kelembagaan Lingkungan
  - Kelembagaan dan Tata Laksana
  - Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- Standarisasi dan teknologi
  - Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
  - Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
  - Teknologi Ramah Lingkungan
- Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Pemantauan dan Kajian Kualitas  
Lingkungan  
Laboratorium Rujukan dan  
Pengujian

## 700 PENGAWASAN

### PENGAWASAN INTERNAL

#### Rencana Pengawasan

Rencana Strategis Pengawasan  
Rencana Kerja Pengawas Tahunan  
Rencana Kinerja Tahunan  
Rencana dan Penetapan Kinerja  
Tahunan  
Rakor Pengawasan Tingkat Daerah

#### Pelaksanaan Pengawasan

Laporan Hasil Audit (LHA),  
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),  
Laporan Hasil Pemeriksaan  
Operasional (LHPO), Laporan Hasil  
Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan  
(LA), Laporan Auditor Independen  
(LAI) yang memerlukan tindak  
lanjut (TL)

Laporan Hasil Audit Investigasi  
(LHAI) yang mengandung unsur  
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan  
memerlukan tindak lanjut

Laporan Hasil Audit Investigasi  
(LHAI) yang mengandung unsur  
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan  
tidak memerlukan tindak lanjut

700.1.2.4 Laporan Perkembangan  
Penanganan Surat Pengaduan  
Masyarakat

700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data  
Tindak Lanjut Temuan  
Laporan Perkembangan Barang  
Milik Negara

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi  
Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review  
Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan

Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas

Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan

Formasi dan Pengadaan Pegawai

Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus

Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN

Pengumuman Kelulusan ASN

Berkas Lamaran Yang Tidak  
Diterima  
Pengangkatan ASN  
Open Bidding (Seleksi Terbuka  
Jabatan)  
Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN  
Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi  
ASN

#### Mutasi Pegawai

Usulan Alih Status, Pindah  
Instansi, Pindah Wilayah Kerja,  
Diperbantukan, Dipekerjakan,  
Penugasan Sementara, Mutasi  
antar Perwakilan, Mutasi ke dan  
dari Perwakilan, Pemindahan  
Sementara,  
Persetujuan/Pertimbangan Kepala  
BKN  
Kenaikan  
Pangkat/Golongan/Jabatan  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Jabatan Struktural/Fungsional  
Perubahan Data Dasar/  
Status/Kedudukan Hukum  
Pegawai  
Peninjauan Masa Kerja  
Badan Pertimbangan Jabatan dan  
Pangkat (BAPERJAKAT)

#### Pengembangan Karir

Usulan Tugas Belajar/ Ijin  
Belajar/ Diklat/ Kursus/  
Magang/ Ujian Dinas/ Praktek  
Kerja di Instansi lain/ Pertukaran  
antar ASN dengan pegawai swasta  
Penyesuaian ijazah  
Penyusunan Sistem Karier  
Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan  
Penilaian Prestasi Kerja

Angka Kredit Antara lain:  
Pengajuan Daftar Usul Pengajuan  
Angka Kredit, Penilaian Daftar  
Usul Pengajuan Angka Kredit

#### Kinerja Aparatur Sipil Negara

Hasil Penilaian Kinerja dan  
Standar Kerja  
Pengelolaan Database dan Analisis  
Sistem Informasi Kinerja  
Evaluasi dan Pemantauan  
Penilaian Kinerja dan Standar  
Kinerja

#### Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

Kode Etik Pegawai  
Disiplin  
Pemberhentian Dengan Hormat  
Pemberhentian Dengan Tidak  
Hormat  
Pemberhentian Sementara  
Pensiun ASN Antara lain:  
Administrasi Pensiun ASN,  
Penetapan Pensiun ASN,  
Penetapan Pertimbangan Teknis  
Pensiun ASN, Pensiun Pejabat  
Negara dan Janda/ Dudanya

#### Bantuan Hukum

##### Status dan Kedudukan Pegawai

Status Kepegawaian  
Kedudukan Kepegawaian  
Keberatan Pegawai  
Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

##### Sistem Informasi Kepegawaian

Pengolahan Data dan Informasi  
Kepegawaian  
Pengembangan Sistem Informasi  
Kepegawaian  
Pengembangan Sistem Pengelolaan



Tabungan Perumahan  
Bantuan Sosial  
Pakaian Dinas  
Layanan Pegawai yang Meninggal  
Karena Dinas  
Pemberian Tali Kasih  
Pemberian Piagam Penghargaan  
dan Tanda Jasa  
Olahraga dan Rekreasi

## Rekam Medis

### Administrasi Perseorangan

Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pegawai Pemerintah dengan  
Perjanjian Kerja (PPPK)  
Pejabat Negara dan pejabat  
lainnya yang disetarakan  
Sekretaris Daerah  
ASN berjasa/terlibat dalam  
peristiwa berskala nasional

### Penilaian Kompetensi

Penilaian Kompetensi  
Hasil Penilaian Kompetensi

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan  
yang dilakukan oleh Pemerintah  
Daerah

### Pendidikan dan Pelatihan

Sistem Informasi program dan  
pembinaan diklat  
Pedoman-pedoman kediklatan  
Kurikulum-kurikulum diklat  
Modul-modul diklat  
Panduan fasilitator  
Saran/rekomendasi  
penyelenggaraan diklat  
Notulen sosialisasi/Rapat  
Koordinasi Kebijakan Diklat  
Monitoring dan evaluasi program

dan pembinaan diklat  
Konsultasi, advokasi, asistensi  
diklat

#### Widyaiswara

Seleksi dan pengembangan  
Widyaiswara  
Sertifikasi Widyaiswara  
Monitoring dan evaluasi Widyaiswara  
Penilaian Widyaiswara  
Konsultasi, advokasi dan asistensi  
Widyaiswara  
Sistem Informasi Pembinaan  
Widyaiswara

#### Penyelenggaraan Diklat

Perencanaan; peserta, pengajar,  
penjadwalan Penyelenggaraan  
Diklat  
Penyelenggaraan Penyelenggaraan  
Diklat  
Konsultasi, advokasi, asistensi  
penyelenggaraan diklat  
Pengembangan bahan ajar dan  
metodologi pembelajaran  
Sistem informasi diklat  
Monitoring Penyelenggara Diklat  
Monitoring dan evaluasi Pasca  
diklat

#### Alumni

## 900 KEUANGAN

### KEUANGAN DAERAH

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (RAPBD) dan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Perubahan (APBD-P)  
Penyusunan Prioritas Plafon  
Anggaran (PPA)  
Penyusunan Rencana Kerja  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat



Daerah (RKASKPD)

Penyampaian Rancangan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah kepada Dewan Perwakilan  
Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Perubahan  
(RAPBD-P)

Penyusunan Anggaran

Musyawarah Rencana  
Pembangunan (Musrenbang)  
kecamatan

Musyawarah Rencana  
Pembangunan (Musrenbang) Kota  
Rancangan Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran (RDPA) SKPD yang  
telah disetujui Sekretaris Daerah  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
(DPA) SKPD yang telah disahkan  
oleh Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah (PPKD)

Pelaksanaan Anggaran

Surat Penyedia Dana (SPP, SPM  
dan SP2D): UP, GU, TU, LS

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan Daerah

Dokumen Penatausahaan

Keuangan

Pertanggungjawaban Penggunaan  
Dana

Daftar Gaji

Kartu Gaji

Data Rekening Bendahara Umum  
Daerah (BUD)

Laporan Keuangan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Permohonan Pinjaman/Hibah Luar  
Negeri (Blue Book)

Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya

Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender

Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana

Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya

Dokumen Otorisasi Penarikan Dana(Payment Advice)

Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.

Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),

Staff Appraisal Report Report /Laporan

Laporan Hutang Daerah

Completion Report/Annual Report

Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar

Negeri (PHLN)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Manual Implementasi Sistem  
Akuntansi Keuangan Daerah  
(SAKD)

Dokumen Kebijakan Akuntansi  
Arsip Data Komputer dan Berita  
Acara Rekonsiliasi

Laporan Realisasi Anggaran dan  
Neraca Bulanan /Triwulanan  
/Semesteran

Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

Surat Penetapan Pemimpin  
Proyek/Bagian Proyek, Bendahara,  
atas Penggunaan Anggaran  
Kegiatan Pembantuan, termasuk  
Specimen Tanda Tangan

Berkas Permintaan Pembayaran  
(SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-  
Daftar Perincian Penggunaan SPPR-  
SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet  
giro, SPM Nihil,  
Penagihan/Invoice, Faktur Pajak,  
Bukti Penerimaan Kas/Bank  
beserta Bukti Pendukungnya a.l.:  
Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit  
Bank, Permintaan Pelayanan  
Jasa/Service Report dan Berita  
Acara Penyelesaian Pekerjaan

Buku Rekening Bank

Keputusan Pembukuan Rekening  
Pembukuan anggaran terdiri  
antara lain: Buku Kas Umum  
(BKU), Buku Pembantu, Register  
dan Buku Tambahan, Daftar  
Pembukuan

Pencairan/Pengeluaran (DPP),  
Daftar Himpunan Pencairan (DHP),

dan Rekening Koran

#### Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

#### Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya

Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu,

Peraturan/Pedoman/Standar

Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk

Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu,

Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD

dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA

KPUD dan Panwas, Berkas

Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana

Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota,

Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada

KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD,

Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya

Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda

APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

#### Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran

Biaya Bantuan Pemilu

Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara

KPUD, Bendahara Panwasda dan  
Bendahara pada Panitia Pilkada

dan Pemilu

Berkas Penerimaan Komisi, Rabat  
Pembayaran Pengadaan Jasa,  
Bunga, Pelaksanaan  
Pilkada/Pemilu

Berkas setor sisa dana  
Pilkada/Pemilu termasuk setor  
komisi pengadaan barang/jasa,  
rabat, bunga, jasa giro Berkas  
Penyaluran Biaya Pemilu termasuk  
diantaranya Bukti Transfer Bank  
Pedoman Dokumen Penyediaan  
Pembiayaan Kegiatan Operasional  
(PPKO) Pemilu termasuk  
Perubahan/Pergeseran/Revisinya

Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan  
Badan Pemeriksa  
Keuangan Republik Indonesia  
atas Laporan Keuangan  
Hasil Pengawasan dan  
Pemeriksaan Internal

900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa  
Fungsional

900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian  
Daerah

Anggaran Daerah

Anggaran Daerah

Dukungan Teknis Anggaran Daerah

Pendapatan dan Investasi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah Antara lain: fasilitasi  
pelaksanaan kebijakan  
standardisasi pajak daerah dan  
retribusi daerah, penyiapan bahan  
perumusan bimbingan teknis  
pajak daerah dan retribusi daerah,  
penyiapan bahan perumusan

analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

Pinjam Dan Obligasi Daerah  
Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

#### Fasilitasi Dana Perimbangan

Fasilitasi Dana Alokasi Umum  
Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

Fasilitasi Dana Alokasi Khusus  
Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber



Daya Alam Antara lain:  
Koordinasi penyiapan data dasar  
perhitungan, dan rekonsiliasi dana  
bagi hasil pajak dan sumber daya  
alam, Sosialisasi dan supervisi  
dana bagi hasil pajak dan sumber  
daya alam, Penyiapan  
pelaksanaan monitoring dan  
evaluasi dana bagi hasil pajak dan  
sumber daya alam

Dana Otonomi Khusus dan Dana  
Transfer Lainnya Antara lain:  
Sosialisasi dan supervisi dana  
otonomi khusus, Sosialisasi dan  
supervisi dan transfer lainnya,  
Pelaksanaan monitoring dan  
evaluasi dan otonomi khusus dan  
dana transfer lainnya

Dukungan Teknis Fasilitasi Dana  
Perimbangan Antara lain:  
Penyiapan sinkronisasi  
kebijakan dan perimbangan,  
Penyiapan dukungan teknis dana  
perimbangan, Penyiapan data dan  
informasi untuk penyusunan  
laporan dana perimbangan

#### Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Akuntansi Dan  
Pertanggungjawaban Keuangan  
Daerah Antara lain: Fasilitasi serta  
bimbingan teknis di bidang  
akuntansi dan  
pertanggungjawaban keuangan  
daerah, Penyiapan evaluasi  
rancangan peraturan daerah  
pertanggungjawaban keuangan  
daerah

Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

**Pj. BUPATI BREBES,**

**URIP SIHABUDIN**